

LAPORAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2007

Good Corporate Governance Implementation Report



DAFTAR ISI CONTENTS

Visi & Misi Vision & Mission	01	Dewan Pengawas Syariah The Sharia Supervisory Board	46
Memelihara Kemurnian Devotion to Purity	02	Dewan Komisaris Board of Commissioners	48
Sekilas Bank Muamalat Bank Muamalat in Brief	04	Direksi Board of Directors	53
Pernyataan Dewan Pengawas Syariah Statement from The Sharia Supervisory Board	08		
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Good Corporate Governance Implementation Report	11		



VISI VISION

Menjadi bank syariah utama di Indonesia,
dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar
rasional

To become the premier sharia bank in Indonesia,
dominant in the spiritual market, admired in the
rational market

MISI MISSION

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan
Syariah dunia dengan penekanan pada
semangat kewirausahaan, keunggulan
manajemen dan orientasi investasi yang
inovatif untuk memaksimalkan nilai
kepada stakeholder

To become a ROLE
MODEL among sharia
financial institutions
the world over,
emphasizing on
entrepreneurial
spirit, managerial
excellence, and
innovative
investment
orientation to
maximize value
to stakeholders





MEMELIHARA KEMURNIAN

DEVOTION TO PURITY

BERASAL SUMBER YANG BERSIH,
BERBAGI HASIL YANG MURNI

Bank Muamalat adalah bank Islam pertama di Indonesia yang dirintis umat Islam Indonesia dan didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tokoh Muslim di Nusantara. Dengan sumber permodalan berasal lebih dari 800.000 masyarakat muslim Indonesia dan muslim internasional - melalui Islamic Development Bank (IDB) Jeddah, Alhamdulillah modal dan pengelolaan Bank Muamalat sampai saat ini tetap murni syariah.

Produk dan layanan perbankan Muamalat didasarkan pada prinsip dan kaidah syariah sesuai komitmen: "Berasal Sumber yang Bersih, Berbagi Hasil yang Murni". Produk penghimpunan serta penanaman dana dilandaskan pada kaidah murni syariah dan pemberdayaan modal secara produktif.

Didukung oleh Kru Muamalat yang memiliki Spirit Muamalat, militan, intelek, kompetitif dan regeneratif, dengan inovasi tiada henti, jaringan diseluruh Nusantara dan mancanegara serta teknologi informasi keuangan modern, Bank Muamalat menyediakan produk dan jasa keuangan murni syariah yang beragam dan mudah diakses dimanapun nasabah berada.

Dengan credo Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat menjadi lembaga Islam yang bergerak dan berkhidmat melayani kebutuhan perbankan dan keuangan islami, bukan semata-mata bank yang hanya menjual produk perbankan syariah.

DERIVING FROM A PURE SOURCE,
SHARING THE GENUINE GAIN

Bank Muamalat is the first Islamic bank in Indonesia. With an equity capital derived from 800,000 shareholders among Moslem Indonesian as well as the international Islamic communities - through the Islamic Development Bank (IDB) of Jeddah - Bank Muamalat has been creating itself as the first purely sharia bank in capital source and management.

Bank Muamalat products and services are based on the tenets of sharia as our commitment: Deriving from a Pure Source, Sharing the Genuine Gain. These funding, financing products and services are developed along principles of sharia and the concept of productive utilization of capital.

Supported by high integrity, sincere and competent Muamalat Crew, and a service network throughout Indonesia and overseas utilizing modern information technology systems, Bank Muamalat provides its customers everywhere with easy access to a wide variety of purely sharia financial products and services.

With the First Purely Sharia credo, Bank Muamalat became an Islamic institution which is engaged and dedicated to serve Islamic banking and financial needs, and not merely being a bank that sells sharia banking products.



MEMBANGUN AKHLAK ISLAMI SECARA TOTAL

Kata Islam berasal dari kata 'aslama' yang salah satu artinya "berserah diri kepada Tuhan". Orang yang beriman kepada Allah senantiasa mengamalkan Islam secara kaffah agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah.

Salah satu perbuatan yang diharamkan Islam adalah riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam juga mengharamkan penimbunan harta atau modal secara tidak produktif.

Perbankan Islam adalah solusi untuk menyelamatkan umat dari jeratan riba dan Insya Allah terbebas dari jilatan api neraka. Berbeda dengan bank konvensional, bank Islam memperjuangkan hubungan kemitraan dengan bagi hasil dan risiko yang ditanggung bersama antara pemodal dan pengusaha (nasabah), berlandaskan ketulusan, serta kejujuran dan keadilan. Selain itu, modal digunakan secara produktif kepada investasi yang halal agar tercapai kesejahteraan timbal balik antara pemilik modal, pengusaha dan masyarakat di lingkungannya.

Islam adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk manusia. Muamalat hadir untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis religi agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Mari kita MURNI-kan Niat, BERSIH-kan Rezeki, SUCI-kan Hati dan Perbuatan agar tercapai Akhlak Islami yang diridai Allah.

ADHERING FULLY TO THE ISLAMIC PRECEPT

The name Islam derived from the word 'aslama' which among other things means "submitting totally to God." Those who heed the call of Allah will adhere fully to the precepts of Islam, faithfully keeping to a straight path, in the blessed way of Allah.

One of the abominations of Islam is the practice of usury. Allah allows trade and prohibits usury. Islam also prohibits the hoarding of money or capital in unproductive manner.

Islamic banking provides a way to keep muslim adherents away from the worldly and prevalent practice of usury, and Insya Allah, from retributions in the afterlife. Unlike conventional banking, the basic tenets of Islamic banking are based on partnership in which equity and risk are equally shared between lender and borrower in a spirit of trust, honesty and fairness. Moreover, capital is invested productively in economic activities that are 'halal' for the mutual benefit of the investors, entrepreneurs and their immediate communities.

Islam is founded for the good of the universe, including mankind. Muamalat exists to support religious economic activities towards a just and prosperous society.

Let us PURIFY our faith, CLEANSE our fortunes and EASE our conscience in the blessed ways of Islam and Allah.

SEKILAS BANK MUAMALAT

BANK MUAMALAT IN BRIEF



Sejak tahun 1998 sampai dengan 2007, total aset Bank Muamalat Indonesia meningkat mendekati 2.100%, dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%.

From 1998 to 2007, the total assets Bank Muamalat Indonesia increased by 2,100%, and equity grew by 2,000%.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Muamalat mulai beroperasi 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, beberapa pengusaha muslim dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 miliar sehingga menjadi Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya.

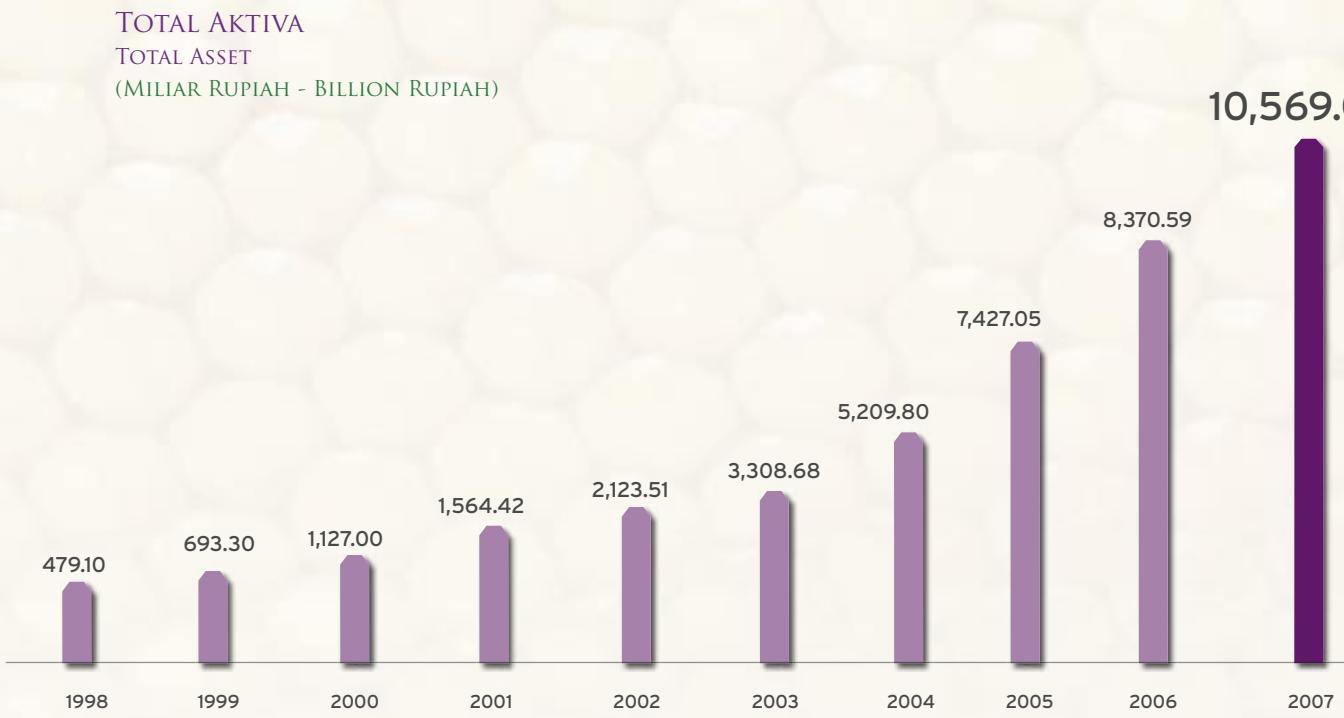
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk was established on 24 Rabius Tsani 1412 H or November 1, 1991, endorsed by the Indonesian Council of Ulemas (MUI) and the Government of Indonesia. Muamalat commenced operations on 27 Syawwal 1412 H or May 1, 1992. Supported by the prominent Indonesian Moslem Scholar & Leaders, a group of Moslem entrepreneurs, and ICMI (Indonesian Association of Moslem Intellectual), the founding of Bank Muamalat also won the support of the general public, by a Rp 84 billion pledge for the purchase of the Bank's shares on the date when the Articles of Association was signed. Thereafter, in a special meeting of the founding at the Presidential Palace in Bogor, West Java, additional pledges Rp 22 billion became Rp 106 billion from communities in West Java as their form of support.

Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit negatif spread dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah.

On October 27, 1994, barely two years from its founding, Bank Muamalat received its license to operate as a Foreign Exchange Bank. This recognition strengthened the Bank's position as the first and leading sharia (Islamic) bank in Indonesia with a growing array of products and services.

In 1997-1998, Indonesia was hit by a financial crisis which devastated most of the national economies in the Southeast Asia region. The national banking sector collapsed under the burden of corporate debt overhang. As a result, many banks were brought under the control of Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) and had to be recapitalised by the government.



Alhamdulillah sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari negatif spread pada saat krisis moneter menghantam sehingga bank syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi pemerintah.

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Dalam periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketiaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Bank Muamalat berhasil melalui masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun yang berhasil mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Dari tahun 1998 hingga 2007, total aset Bank Muamalat meningkat mendekati 2.100% dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%.

Perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat menjadi Rp 10,57 triliun

Praise be to Allah, the sharia banking system was spared of the effects of negative spread during the crisis, enabling Indonesia's first sharia bank to survive as an A Category Bank that was neither placed under IBRA nor recapitalised by the government.

In an effort to strengthen its capital base, Bank Muamalat solicited for a potential investor, which was responded positively by the Islamic Development Bank (IDB) based in Jeddah, Saudi Arabia. In the Annual General Meeting of Shareholders of Bank Muamalat on June 21, 1999, IDB officially became one of the shareholder of Bank Muamalat. The period between 1999 and 2002 represents time of challenges as well as triumphs for Bank Muamalat.

Bank Muamalat succeeded in reversing its financial fortunes from loss back into profitability. This is achieved through the dedicated hard work of the entire Muamalat Crew, supported by strong leadership, astute business strategy, and strict adherence to the principles of sharia in all aspects of its banking practice.

Bank Muamalat was able to overcome these difficult times and re-emerged from catastrophe, starting with the appointment of a new management Board internally. Bank Muamalat proceeded to deploy a five-year business plan which has since returned Bank Muamalat to financial sustainability and growth.

From 1998 to 2007, the total assets Bank Muamalat increased by close to 2,100% and equity grew by 2,000%.

This brought the Bank's total assets to Rp 10.57 trillion as at year-end 2007,

di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar - menjadikannya bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia.

Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (un-served area) dan menggugurkan unsur ketidaktersediaan jaringan layanan perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat The Most Innovative Product untuk kategori "Customer Modes of Entry" dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Shar-E tidak hanya memperluas jaringan pelayanan, namun juga berdampak pada pertumbuhan nasabah yang luar biasa dan menambah ratusan ribu rekening tabungan baru. Sejak kehadiran Shar-E, Bank Muamalat berhasil mengembangkan jaringan pelayanannya secara pesat dan signifikan.

Shar-E juga mencerminkan keberhasilan Bank Muamalat untuk mengedepankan aliansi serta inovasi hingga saat ini.

with total shareholders' equity of Rp 846.16 billion and a net profit for the year of Rp 145.33 billion - making Bank Muamalat the most profitable sharia bank in Indonesia, today.

In 2004, an innovative solution was born in response to the MUI fatwa with respect to bank interest rate that was declared "haram," with the launch of share-E. Shar-E was created to serve areas that were previously unserved by sharia banking and thereby nullified the lack of the sharia banking service network that had been a basis for exemption of the above MUI fatwa. As a result of this breakthrough, Shar-E earned the predicate of The Most Innovative Product in the category of "Customer Modes of Entry" from the State Ministry of Research and Technology/Board of Research and Applied Technology (BPPT).

Shar-E has not only provided Bank Muamalat with a much broader service network, but has also been instrumental in growing its customer base substantially, adding hundreds of thousands of new savings accounts. Since the introducing of Shar-E, Bank Muamalat has rapidly and significantly expanded its service network.

Shar-E also reflects the success of Bank Muamalat in championing alliances and innovation to this date.

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

STATEMENT FROM THE SHARIA SUPERVISORY BOARD



K. H. M. A. Sahal Mahfudh
Ketua - Chairman



Prof. Dr. H. Muwardi Chatib
Anggota - Member



Prof. Dr. H. Umar Shihab
Anggota - Member



K. H. Ma'ruf Amin
Anggota - Member

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ASSALAMUALAIKUM Wr. WB.

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat dengan ini menyatakan bahwa, berdasarkan pengawasan kami selama semester I dan semester II 2007 :

- Pelaksanaan produk dan jasa yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah.
- Pedoman operasional dan produk yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah.
- Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai kaidah.

WASSALAMUALAIKUM Wr. WB

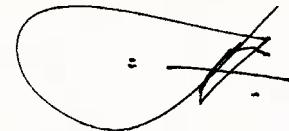
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ASSALAMUALAIKUM Wr. WB.

The Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat hereby states that, based on our supervision throughout semester I and semester II of 2007 :

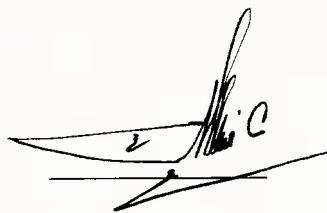
- The provision of products and services including funding and financing has complied with the Fatwa of the National Sharia Board and the ruling of the Sharia Supervisory Board.
- The guidelines on operations and products including funding and financing have complied with the Fatwa of the National Sharia Board and the ruling of the Sharia Supervisory Board.
- The company's financial statements are compiled and presented in accordance with the Sharia principles.

This statement is issued in good faith.

WASSALAMUALAIKUM Wr. WB



K.H. M. A. Sahal Mahfudh
Ketua
Chairman



Prof. Dr. H. Muardi Chatib
Anggota
Member



Prof. Dr. H. Umar Shihab
Anggota
Member



K. H. Ma'ruf Amin
Anggota
Member

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NO. 476/BMI/DIR/V/2008

JAKARTA, 28 MAY 2008 M
 22 JUMADAL ULA 1429 H

Kepada Yth.
 Direktorat Perbankan Syariah
 BANK INDONESIA
 Jl. MH. Thamrin No. 2
 Jakarta 10110

Perihal : Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam sejahtera semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin.

Memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI), untuk kondisi Bank akhir bulan Desember 2007.

Adapun laporan pelaksanaan GCG tersebut di atas, terdiri dari sebagai berikut :

- Kertas Kerja hasil self assessment pelaksanaan GCG
- Summary hasil penilaian self assessment
- Laporan Pelaksanaan GCG

Selanjutnya mengingat laporan GCG secara lengkap ini baru pertama kali disampaikan maka untuk bahan perbaikan dan evaluasi kami diwaktu yang akan datang, diharapkan masukan atau saran dari pihak Bank Indonesia, apabila ada.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

To:
 The Directorate of Syariah Banking
 BANK INDONESIA
 JI. MH. Thamrin No.2
 Jakarta 10110

Re: Report on the Implementation of Good Corporate Governance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Best wishes to You and your staffs, may all of you be always under the protection, guidance and blessings of Allah SWT, Amien.

Referring to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006, regarding the Implementation of GCG of commercial banks, and as had been revised in the PBI No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006, with accords to the Bank Indonesia letter No. 9/12/DPNP dated 30 May 2007 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of commercial banks, thus, this Report on the Implementation of Good Corporate Governance of PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (BMI), is submitted as of the latest condition of the bank, on December 2007.

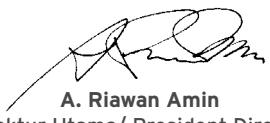
However, the report on the implementation of GCG mentioned above consists of the following :

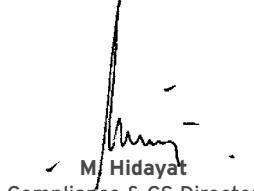
- Working paper on the self assessment results of GCG implementation
- Summary of self assessment valuation results
- Report on the implementation of GCG

Furthermore, being aware that this is the first complete GCG report to be submitted, we would be grateful if Bank Indonesia could provide advice and input for future reviews and evaluations.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
 Direksi, Board of Directors


A. Riwaw Amin
 Direktur Utama/ President Director


M. Hidayat
 Compliance & CS Director

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.

POSISI AKHIR DESEMBER 2007

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION
REPORT PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
AS OF DECEMBER 31TH, 2007

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG, maka dengan ini dapat disampaikan laporan pelaksanaan GCG atau Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, untuk posisi laporan akhir Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut:

Pursuant to provisions contained in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks and PBI No.8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 on the Amendment of PBI No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 9/12/DPNP dated May 30, 2007 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks, particularly Article 62 and Article 63 on the Banks' obligations to submit the GCG implementation report, we hereby submit the GCG implementation report of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk as of 31 December 2007, as follow:

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di Bank Muamalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit sebagai nilai yang terintegrasi dalam ZIKR, PIKR dan MIKR yang terurai dalam Celestial Management, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelola usaha dan kode etik Bank Muamalat.

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara islami dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku baik diperbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan suatu dasar bagi Bank Muamalat untuk terus berupaya menjadi bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini. Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Tanggung Jawab
4. Independensi
5. Keadilan
6. Disiplin
7. Sikap Kepedulian

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

Selama kurun waktu tahun 2007 pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini telah dilakukan, dan dari aspek transparansi dapat dirinci sebagai berikut :

I. INTRODUCTION

The Good Corporate Governance (GCG) implementation in PT Bank Muamalat has become an indivisible part of Muamalat Spirit as a value integrated in ZIKR, PIKR, and MIKR described in the Celestial Management. In essence, The GCG is interpreted as spirit of responsibility, obligation, transparency, and fairness through total devotion and sincere obedient to Allah SWT and by means of ability, knowledge, information, and reward equality. The aforesaid spirit has become a fundamental for the implementation of good corporate governance and code of ethics of Bank Muamalat.

The Islamic good corporate governance principles which is in line with best practices applicable in both national and international banking industry and values embraced in Bank Muamalat, has become a ground-work for the Bank to continue its effort to become the best bank in term of GCG implementation. The above mentioned values are reflected from the following aspects:

1. Transparency
2. Accountability
3. Responsibility
4. Independence
5. Fairness
6. Discipline
7. Social Awareness

II. THE TRANSPARENCY OF GCG IMPLEMENTATION

In the course of 2007, Bank Muamalat's GCG implementation has become a continuation of GCG implementation that has been done during the past years. The following are details of transparency aspect:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris & Direksi

a. Dewan Komisaris

RUPS pada tahun 2007 telah menetapkan personal Dewan Komisaris serta komposisinya yang masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Adapun nama-nama dari pada anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Drs. Abbas Adhar :
sebagai Komisaris Utama
(sejak th 1999),
2. Prof. Korkut Ozal :
sebagai Anggota Komisaris
(sejak th 1999),
3. Drs. Aulia Pohan :
sebagai Anggota Komisaris
(sejak th 2006),
4. Dr. Ahmed Abisourour :
sebagai Anggota Komisaris
(sejak th 2006),
5. H. Iskandar Zulkarnain, SE.Msi :
sebagai Anggota Komisaris
(sejak th 2004).

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus terlebih dahulu mengikuti proses fit and proper test dari Bank Indonesia, dan apabila telah memenuhi persyaratan maka Bank akan mendapat surat persetujuan dari Bank Indonesia. Alhamdulillah seluruh anggota Dewan Komisaris BMI telah mengikuti fit and proper test dimaksud dan semuanya telah pula dinyatakan lulus dan dapat diangkat oleh Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi anggota Dewan Komisaris BMI. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan cukup panjang di bidang perbankan dan di bidang keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dewan Komisaris bertindak atas nama pemegang saham, dan tugas

1. Roles and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors

a. Board of Commissioners

The General Meeting of Shareholders, which was held in 2007, appointed members of Board of Commissioners along with its composition which was similar with that of previous year. The following are names of Board of Commissioners:

1. Drs. Abbas Adhar :
the President Commissioner
(in the position since 1999),
2. Prof. Korkut Ozal :
member of Board of Commissioners
(since 1999),
3. Drs. Aulia Pohan :
member of Board of Commissioners
(since 2006),
4. Dr. Ahmed Abisourour :
member of Board of Commissioners
(since 2006),
5. H. Iskandar Zulkarnain, SE.Msi :
member of Board of Commissioners
(since 2004).

In conformity with the provisions of Bank Indonesia, the appointment of member of Board of Commissioners should, beforehand, undertake the fit and proper test process organized by Bank Indonesia. Should the candidate meet all requirements; Bank Indonesia shall furnish an approval letter to the respected bank. All praises be upon Allah SWT, all of Board of Commissioner members have undertaken the fit and proper test and successfully passed the test, thus, eligible to be appointed as the member of Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia (BMI) in the Bank's General Meeting of Shareholders. All of the bank's Board of Commissioner members have a deep knowledge and wide experiences in banking and financial industries in both local and international level.

mereka adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi secara kolektif dalam mengelola Bank, agar selalu mengacu atau sesuai dengan tujuan dan strategis bisnis yang telah ditetapkan. Tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap temuan audit intern dan ekstern untuk memastikan bahwa semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan Direksi.

Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan GCG tersebut telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi yang tugasnya membantu tugas komisaris melakukan pengawasan dan memastikan bahwa semua laporan dan atau temuan hasil audit atas operasional bank yang dilakukan Direksi telah sejalan dengan rencana dan ditindaklanjuti sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan data di atas maka jumlah anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Jumlah ini sama dengan atau tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5(lima) orang. Selain itu dari ke-5 anggota Dewan Komisaris tercatat sebanyak 4 (empat) orang yaitu Drs. Abbas Adhar, Drs. Aulia pohan MA dan H. Iskandar Zulkarnain, SE.Msi dan DR. Ahmed Abisourour, yang merupakan Komisaris Independen. Ke-4 (empat) anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

The Board of Commissioners shall act for the interests of shareholders and monitor and supervise the Board of Directors in collegially manage the bank to ensure that the bank is managed in conformity with defined purposes and business strategies. In addition, Board of Commissioners is responsible for monitoring the findings of internal and external auditors to make sure that those findings are properly followed up in accordance with commitment given by the Board of Directors.

To keeping up with the GCG provisions, the Bank Muamalat's Board of Commissioners has established functioning committees, among others, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration & Nomination Committee. Those Functioning Committees are responsible for providing assistance to the Board of Commissioners in supervising and ensuring that all reports and or audit findings associated to the bank's operating activities managed by the Board of Directors are aligned with the plan and are followed up in conformity with good corporate governance concepts.

The number of members of Bank Muamalat Board of Commissioners is five, similar to that of Board of Director members. Some four out of five members of Bank Muamalat Board of Commissioners are independent commissioners, namely Drs. Abbas Adhar, Drs. Aulia Pohan, H. Iskandar Zulkarnain SE, Msi., and Dr. Ahmed Abisourour. Those four independent commissioners do not have any relationship in term of shares ownership, financial, management and or family relationship with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and or controlling shareholders or any relationship with the Bank, as stated in the regulation PBI No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on the Implementation of Good Corporate

No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, keuangan, kepengurusan dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Hal ini berarti jumlah komposisi dan strukturnya serta kriteria sebagai Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI tersebut di atas.

b. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan/pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BMI.

Komposisi dan persyaratan Direksi:

1. H.A. Riawan Amin, M.Sc sebagai Direktur Utama,
2. Ir. H. Andi Buchari, MM sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi,
3. H. M. Hidayat, SE. Ak sebagai Direktur Kepatuhan dan Korporat Support,
4. Ir. H. Arviyan Arifin sebagai Direktur Bisnis,
5. Drs. U. Saefudin Noer, M.Si sebagai Direktur Bisnis.

Komposisi tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan BMI dan dengan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun demikian berhubung Komite Remunerasi dan Nominasi baru dibentuk dalam bulan Agustus tahun 2007 maka untuk pengangkatan anggota Direksi yang lalu belum ada rekomendasi dari Komite

Governance for General Banks and PBI No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 on Changes over Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for General banks. This is indicating that number, composition, structure, and criteria for independent commissioners have aligned with provisions as stipulated in PBI concerning the GCG.

b. Board of Directors

Board of Directors has become a company organ holding a full responsibility for managing/running the company which is acting only for the company interests and objectives as well as representing the company inside or outside the court of justice in according with BMI's Articles of Association.

The following are composition of members of Board of Directors:

1. H.A. Riawan Amin, M.Sc as the President Director,
2. Ir. H. Andi Buchari, MM as Director of Finance and Administration,
3. H. M. Hidayat, SE. Ak as Director of Compliance and Corporate Support,
4. Ir. H. Arviyan Arifin as Director of Business,
5. Drs. U. Saefudin Noer, M.Si as Director of Business.

The above composition is subject to changes as necessary in conformity with the need of BMI and is taking place through the General Meeting of Shareholders mechanism as well as based on the analysis results and recommendations carried out by Remuneration and Nomination Committee. However, in conjunction with the fact that Remuneration and Nomination Committee was only established in August 2007, the recommendations of the Committee for the appointment of the previous Board of

Remunerasi dan Nominasi.

Dalam memilih dan mencalonkan anggota Direksi BMI, bank telah memiliki persyaratan atau kriteria untuk seseorang akan menjadi calon Direksi, yaitu berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan Umum adalah merupakan Persyaratan Dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Persyaratan Khusus, yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis BMI sebagai perusahaan yang bergerak di sektor perbankan syariah.

Persyaratan Umum dan Khusus bagi Direksi adalah orang perseorangan yang:

- (a) Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- (b) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- (c) Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- (d) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.
- (e) Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Direktur lain. Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Anggota Komisaris.
- (f) Tidak boleh merangkap jabatan lain selain sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direktur atau Pejabat Eksekutif pada bank lain dan/atau lembaga lain, kecuali dalam rangka melakukan pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan BMI non bank sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur BMI.

Directors hadn't taken place yet.

Bank Muamalat has requirements and criteria for appointing and nominating a member of Board of Directors, i.e. general and special requirements. General Requirements have become basic requirements stipulated under applicable rules and regulations, whilst Special Requirements are those requirements adjusted with the need and nature of BMI business in its capacity as a company engaged in Islamic Banking Sector.

The following are General and Special Requirements applied for an individual to become a member of Bank Muamalat's Board of Directors:

- (a) Able to perform a legal action,
- (b) Never been declared of bankrupt by any Court,
- (c) Never been holding a position as a member of Board of Director or Board of Commissioner which is declared guilty for causing the bankruptcy of a Company,
- (d) Never been punished or imprisoned for criminal conduct(s) causing the financial losses for the state in the course of the past five years prior to the appointment,
- (e) It is not allowed to have family relation by blood up to the third grade, either laterally or relations generated by married (son-in-law or brother-in-law) with other member of Board of Directors, Islamic Surveillance Council, and/or Board of Commissioners,
- (f) Should not hold any concurrent position as a member of Board of Directors, Board of Commissioners, or Executive Official in other Bank(s) and/or other Company(s), unless purely for surveillance towards BMI's Non-Bank Subsidiary(s) so long as the assignment doesn't consume his/her main tasks and responsibilities as a member of BMI's Board of Directors,



- (g) Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan BMI.
- (h) Memiliki integritas dan reputasi yang baik yaitu tidak pernah secara langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perseroan.
- (i). Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan BMI.
- (j) Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
- (k) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (l) Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (m) Memiliki pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- (n) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank syariah yang sehat.
- (o) Lulus Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Direksi bertanggung jawab melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien; memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola kru BMI dan melaporkan kinerja BMI secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Pencalonan dan pemilihan Direksi dilakukan dalam RUPS, dan pemegang saham dapat pemberhentikan Direktur sebelum masa

- (g) Should not hold any concurrent position that can potentially generate a conflict of interest, either directly or otherwise with BMI,
- (h) Having an integrity and a well reputation, i.e. never been involved, either directly or otherwise, in any manipulation or discrepancy actions, breaks the commitment, and other conducts-generating loss to the company,
- (i) Having a good personality and capacity of business development for the sake of BMI's advancement,
- (j) Having a great competencies, i.e. capabilities and experiences in various fields supporting the implementation of Boards of Directors' tasks and obligations,
- (k) Having a good attitude and morality,
- (l) Having commitment to comply with all applicable rules and regulations,
- (m) Having adequate and relevant knowledge, in the field of commercial banking and Islamic banking, with his/her position,
- (n) Having capability to perform strategic management for the purpose of developing a sound Islamic banking,
- (o) Successfully managed to pass the fit and proper test carried out Bank Indonesia.

Board of Directors is responsible to perform effective and efficient internal monitoring; monitor the risk and risk management, maintain a conducive working climate in such a way that productivity and professionalism can be made better, managing all BMI's personnel and reporting the entire BMI activities to the Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders.

The nomination and appointment of members of Board of Directors takes place during the General Meeting of Shareholders (GMOS).

jabatan yang bersangkutan berakhir lewat keputusan RUPS. Pencalonan Direksi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi & Nominasi. Komite ini diketuai oleh Presiden Komisaris.

Berdasarkan data dan informasi yang ada diketahui bahwa di Bank Muamalat tidak terdapat hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris, demikian pula antara sesama anggota Komisaris itu sendiri, tidak ada yang memiliki hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh 6 (enam) Komite Eksekutif atau disebut juga dengan Asisten Direksi terdiri dari:

1. Afrid Wibisono : Asisten Direksi Financial Settlement Group (FSG),
2. M. Harris : Asisten Direksi Administrasi (Adm),
3. Delyuzar Syamsi : Asisten Direksi Funding & Pelayanan Nasabah,
4. Kalamuddinsjah : Asisten Direksi HI & PSDI,
5. Febriyandi B. Putra : Asisten Direksi Remedial,
6. Avantiono Hadhianto : Asisten Direksi Business Int'l & Shar-E Alliance,
7. Muchtar MD, Siswoyo : Asisten Direksi Lemb.Keu Mikro Syariah (LKMS).

Para asisten direktur bertanggung jawab dalam memberikan pendapat professional dan membantu Direksi dalam menjalankan strategi Bank secara efisien dan efektif, serta

Shareholders can discontinue member(s) of Board of Directors from holding his/her position before his/her period in fully concluded, through the resolution of GMOS. The nomination of a member of Board of Directors is carried post to the recommendation scheme proposed by the Committee of Remuneration and Nomination, which is presided over by a President Commissioner.

Based on prevalent data and information, it is known that in Bank Muamalat, there are no family relationship among the members of the Board of Directors nor with the Board of Commissioners. Similarly, among the members of Board of Commissioners, there are no family relationship, both horizontally as well as vertically.

In conducting their professional duties, the Board of Directors are assisted by six Executive Committees or also called as Assistants to Directors, these are:

1. Afrid Wibisono : Assistant to the Director of Financial Settlement Group (FSG),
2. M. Harris : Assistant to the Director of Administration,
3. Delyuzar Syamsi : Assistant to the Director of Funding & Customers' Services,
4. Kalamuddinsjah : Assistant to the Director of HI & PSDI,
5. Febriyandi B. Putra : Assistant to the Director of Remedial,
6. Avantiono Hadhianto : Assistant to the Director of Business International & Shar-E Alliance, and
7. Muchtar MD, Siswoyo : Assistant to the Director of Islamic Micro Financial Institutions (LKMS).

These Assistants to the Directors are responsible in providing professional opinions and assistance to the Directors, in undertaking the defined strategies of BMI, efficiently

mengkaji kinerja operasional Bank Muamalat dan berbagai persoalan penting yang dihadapi, selain mengelola risiko secara sistematis dan proaktif. Kesemuanya ditujukan guna memberikan nilai tambah pada Bank Muamalat secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan pemisahan fungsi-fungsi serta kewenangan secara berjenjang dari tingkatan paling atas (manajemen) sampai kepada tingkatan unit kerja, termasuk fungsi pengawasan yang ada di Bank Muamalat.

Direksi berhak membentuk komite-komite permanen pada tingkat Direksi dan Senior Manajemen, serta mengatur keanggotaan dan ketentuan lainnya yang disyahkan melalui Surat Keputusan Direksi, adapun komite-komite yang telah dibentuk oleh Direksi yaitu:

1. Asset & Liabilities Management Committee (ALCO),
2. Credit Policy Committee (CPC),
3. Human Resource Committee (HRC),
4. Komite Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur Utama dan beranggotakan dari Kru Senior Officer dimasing-masing unit kerja di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO). Komite ini bertanggung jawab untuk pengembangan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko secara keseluruhan,
5. Komite Kebijakan / Komite Penanaman Dana / Pembiayaan yang dipimpin oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direktur yang terkait, yang bertugas membantu Direksi untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portfolio Penanaman Dana serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Sedangkan Komite PD yang

and effectively, whilst carefully analyze the Bank's operating performance along with its various critical problems being faced and to manage risks systematically and proactively. All of the above mentioned responsibilities are aimed to provide added value to the Bank in a long term and sustainable manner to the shareholders, by consistently taking into account the interests of other shareholders. Such has been proven by the segregation of functions and authorities in strata-basis commencing from the top management down to working units, including the monitoring function owned by the bank.

The Board of Directors are entitled to form permanent committees at the Directors level and Senior Management, and to arrange the memberships and other provisions legalized through the Decision Letter of Board of Directors. The committees which are successfully established are as follows:

1. Asset & Liabilities Management Committee (ALCO),
2. Credit Policy Committee (CPC),
3. Human Resource Committee (HRC),
4. Risk Management Committee, chaired by the President Director, whose members consists of Senior Officer personnels of each working units at the Non-Operational Head Office (KPNO). The Committee is responsible to evaluate and develop the overall risks management policy, and
5. Policy Committee/Fund Investment/ Financing Policy, chaired by the President Director, whose members consists of related Directors. The committee is responsible to provide assistances to the Board of Directors in formulating policies, monitoring its implementation, overseeing the development of condition of fund investment portfolio, and to provide opinions for improvements. Meanwhile, the Fund Investment Committee, with

anggotanya disesuaikan/diatur dengan SK Direksi, bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau penolakan PD sesuai dengan batas wewenang dan atau jenis PD yang ditetapkan Direksi.

Persetujuan atau penolakan tersebut ditentukan setelah melakukan koordinasi dengan ALCO dan berdasarkan kemahiran / keprofesionalannya.

Evaluasi Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Rekomendasi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) para pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja Direksi maupun Dewan Komisaris dan anggotanya serta pelaksanaan kewajiban utama mereka. Kinerja Direksi sendiri, baik masing-masing maupun anggota, dievaluasi oleh Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bulan.

Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap bulan sedangkan Direksi mengadakan rapat paling sedikit dua minggu sekali atau kapan saja diperlukan. Rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan Dewan Direksi diselenggarakan setiap bulan untuk membahas kemajuan Bank secara umum. Setiap rapat dibuatkan notulen dan didalamnya terdapat pula rekomendasi-rekomendasi Komisaris, yang perlu untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

Dewan Komisaris juga bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

members being adjusted or arranged under the Decision Letter of Board of Directors, are responsible to provide approval or rejection towards Fund Investment in accordance to the authority given and or type of Fund Investment determined by the Board of Directors.

The approvals or rejections meant above takes place through the coordination with ALCO and are based on expertise and professionalism.

Performance Evaluation towards the Board of Directors and the Board of Commissioners and Recommendations

In the Annual General Meeting of Shareholders, shareholders can evaluate the performance of Board of Directors, Board of Commissioners and its members as well as the implementation of their primary obligations. The performance of Board of Directors, both collegially and each of its member, is evaluated by the Board of Commissioners in a joint meeting between Board of Directors and Board of Commissioners which is convened every month.

The Board of Commissioners convenes a meeting once in a month, whilst the Board of Directors convenes a meeting once in two weeks, or any time necessitated. A joint meeting between Board of Directors and Board of Commissioners is convened in every month to discuss the progress of the Bank in general. In each meeting, minutes of the meeting shall be drawn by incorporating the Board of Commissioners recommendations which need to be discussed and followed up by the Board of Directors.



DAFTAR HADIR RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2007
THE LIST OF MEETING ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IN 2007

NAMA PEJABAT NAME OF SENIOR OFFICER	RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTOR MEETING	RAPAT DEWAN DIREKSI DAN ANGGOTA BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS MEETING
Abbas Adhar	7x	
Korkut Ozal	7x	
Ahmed Abisourour	7x	
Iskandar Zulkarnain	6x	
Aulia Pohan	6x	
A. Riawan Amin	7x	19x
Arviyan Arifin	7x	17x
M. Hidayat	7x	14x
Andi Buchari	7x	17x
U. Saefudin Noer	6x	15x
Herbudi S. Tomo	7x	6x

Remunerasi & Nominasi menyelenggarakan rapat untuk mengkaji dan membahas antara lain apakah kegiatan/rencana audit, kegiatan manajemen risiko berjalan dengan baik selain itu dibahas juga profil risiko Bank, laporan hasil audit walaupun belum secara keseluruhan dan dilakukan evaluasi untuk melihat apakah memadai atau tidaknya antara lain penyisihan penghapusan, seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dan kecukupan modal Bank.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan BMI serta pelaksanaan operasional BMI yang senantiasa mamatuhi (compliance) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan syariah.

The Board of Commissioners together with Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination & Remuneration Committee convene a meeting to analyze and discuss, among others, whether audit activities or planning, and risk management activities are properly implemented. In addition, the meeting also discusses the Bank's risk profile, a portion of audit report, and evaluate the appropriateness of write-off allowances, how high the magnitude of non-performing loans, and the bank's capital adequacy.

c. The Syari'ah Supervisory Council

The Syari'ah Supervisory Council (DPS) is responsible to continuously supervise the business activities and provide opinions on the purity of Islamic principles embraced.

The working relationship between the Syari'ah Supervisory Council, the Board of Directors, and Board of Commissioners takes form through checks and balances with an ultimate purpose of achieving the advanced, sound, and sustainable BMI by consistently comply with, both general and Syari'ah, applicable rules and regulations.

Dewan Pengawas Syariah diusulkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi(evaluating) dan pengawasan (supervising) kegiatan perusahaan bahwa kegiatan usaha BMI tersebut mematuhi (compliance) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan selain itu Anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat oleh RUPS. DPS telah menyampaikan Laporannya setiap 3 bulan kepada BI sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di BMI.

Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah BMI adalah sebagai berikut :

1. K.H. A. Sahal Mahfudh : Ketua Dewan Pengawasan Syariah,
2. Prof. Dr. Muardi Chatib : Anggota Dewan Pengawas Syariah,
3. Prof Dr. H. Umar Shihab : Anggota Dewan Pengawas Syariah,
4. K.H. Ma'ruf Amin : Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk kelangsungan usaha BMI dalam jangka panjang yang tercermin pada :

- (a) Terpelihara kesehatan BMI sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah islam serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

The Syari'ah Supervisory Council is proposed by the National Syari'ah Council (DSN) and is an independent legal body whose task to directing, consulting, evaluating, and supervising the company's activities to ensure that those activities comply with Syari'ah principles as specified by the edicts and Islamic values. Based on the regulation of Bank Indonesia, the whole Syari'ah banking transactions shall be conducted in conformity with the edicts issued by the National Syari'ah Council. The regulation also stipulated that members of Syari'ah Supervisory Council shall be consisted of at least three persons appointed by the General Meeting of Shareholders. The Syari'ah Supervisory Council has regularly furnished Bank Indonesia with Quarterly Report as a responsibility material on the implementation of obligations at BMI.

The following are members of BMI's Syari'ah Supervisory Council:

1. K.H. A. Sahal Mahfudh: the Chairman of Syari'ah Supervisory Council,
2. Prof. Dr. Muardi Chatib: the Member of Syari'ah Supervisory Council,
3. Prof. Dr. H. Umah Shihab: the Member of Syari'ah Supervisory Council, and
4. K. H. Ma'ruf Amin: the Member of Syari'ah Supervisory Council.

The Syari'ah Supervisory Council, Board of Commissioners, and Board of Directors are, according to their respective roles, responsible for the sustainability of BMI's long-term business, which is reflected in the following items:

- (a) The well-preserved BMI's sound business by taking into account the prudent principles and compliance towards Syari'ah values and principles as well as applicable rules and regulations,

- (b) Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko (risk management)
- (c) Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi pemegang saham.
- (d) Terlindunginya kepentingan stakeholder secara wajar.
- (e) Terpenuhinya pelaksanaan good corporate governance
- (f) Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen disemua unit organisasi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite yang berada di bawah Komisaris

a. Komite Audit

Komite Audit beranggotakan tiga orang yang diketuai oleh Komisaris Independen dan masing-masing menguasai bidang keuangan, perbankan dan akuntansi. Mereka mengadakan rapat sebulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. Komite ini bertanggung jawab memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan serta pengawasan terhadap proses audit intern. Sesuai SK Direksi No. 006/KOM/KPTS/VI/2007 dan Piagam Komite Audit, tugasnya adalah sebagai berikut :

- (i) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit. serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (ii) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

- (b) Appropriate implementation of internal control and risk management,
- (c) The accomplishment of fair rate of return to all shareholders,
- (d) The fairly protected shareholders interests,
- (e) The fulfillment of Good Corporate Governance concepts and principles, and
- (f) The leadership succession and management continuity at all organization's units are appropriately implemented.

2. The Components and Tasks Implementations of Functioning Committees under the Board of Commissioners

a. Audit Committee

Members of BMI's Audit Committee are three people and are presided over by an Independent Commissioner. Each committee members are mastering the financial, banking, and accounting disciplines respectively. The committee convenes a meeting once in a month or any time as needed. The Audit Committee is responsible for supervising and monitoring the financial statements composing as well as overseeing the internal audit process. Pursuant to the Decision Letter of Board of Directors No. 006/KOM/KPTS/VI/2007 and Audit Committee Charter, the tasks of Audit Committee are as follows:

- (i) Monitoring and evaluating the audit planning and implementation as well as overseeing the follow-up activities towards audit findings in order to assess the sufficiency of internal control, including the adequacy of financial reporting process,
- (ii) Monitoring and evaluating towards:
 - Task implementation of Internal Audit Working Unit.

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Apuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atau hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

(iii)Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada rapat RUPS.

Adapun Susunan Komite Audit tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Drs. Aulia Pohan. MA : Ketua Komite Audit,
2. H. Hilmy. SE : Anggota Komite Audit,
3. Drs. H. Amir Rajab Batubara : Anggota Komite Audit,

b. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Sesuai SK Direksi No. 005/KOM/KPTS/VI/2007 dan Piagam Komite Pemantau Risiko, kriteria dan tugas dari Komite ini adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan.
- (b) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- (c) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko,

- The appropriateness of audit implementation by Public Accountant Office with applicable audit standards.
- The appropriateness of financial statements with applicable audit standards, and
- The implementation of follow-up activities by the Board of Directors on the findings of Internal Audit Working Unit, public accountant, and the findings of Bank Indonesia's surveillance.

(iii)It is a mandatory for Audit Committee to provide recommendation(s) concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Office to the Board of Commissioners to be conveyed at the General Meeting of Shareholders.

The following are names of members of BMI's Audit Committee of 2007:

1. Drs. Aulia Pohan : as the Chairman of Audit Committee,
2. H. Hilmy, SE : as a member of Audit Committee,
3. Drs. H. Amir Rajab Batubara : as a member of Audit Committee,

b. Risk Monitoring Committee

Pursuant to the Decision Letter of Board of Directors No. 005/KOM/KPTS/VI/2007 and Risk Monitoring Committee Charter, the criteria and tasks of Risk Monitoring Committee are as follows:

- (a) Evaluating the risk management's policy and strategy which is compiled annually by the management,
- (b) Evaluating the Board of Directors' responsibility report on the implementation of risk management policy,
- (c) Evaluating steps to be taken by the Board of Directors in order to comply with the regulation of Bank Indonesia and other applicable rules and regulations in the realization of prudent principles, particularly those associated with risks management,

- (d) Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha BMI, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- (e) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sementara itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebutkan bahwa anggota KPR harus memenuhi kriteria antara lain:

- Memiliki pengetahuan dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
- Memiliki pengalaman kerja dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Abbas Adhar : Ketua Komite Pemantau Risiko
2. Seno Eko Budianto. SE : Anggota Komite Pemantau Risiko
3. Sjachril Bakri. SE. MM : Anggota Komite Pemantau Risiko

Sejak terbentuknya bulan Juni 2007 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 4 kali dan telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas Direksi yang dianggap perlu mendapat perhatian dan perbaikannya. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Program Kerja Komite Pemantau Risiko (KPR) selama tahun 2007 adalah melakukan review

- (d) Evaluating the findings of Board of Directors' surveillance towards BMI's business activities to ensure that it's not diverting from the predetermined provisions, and
- (e) Evaluating the proposition of the Board of Directors related with transactions or business activities exceeding its defined authorities to be designated by the Board of Commissioners as the basic for decision making.

In the meantime, in conformity with prevalent rules and regulations, all members of Risk Monitoring Committee shall fulfill the following criteria:

- Having proficient knowledge in economics, financial, and or banking disciplines, and
- Having, at least, five years experiences in economics, financial, and or banking sectors.

The Risk Management Committee consists of the following:

1. Drs. H. Abbas Adhar : Head of the Risk management Committee
2. Seno Eko Budianto. SE : Member of the Risk management Committee
3. Sjachril Bakri. SE. MM : Member of the Risk management Committee

Since its inception in 2007, the Audit Committee and Risk Management Committee have convened meetings for four times and provided inputs to Board of Commissioners related to tasks' implementation of Board of Directors which is deemed deserve for intensive attention and improvement. The Audit Committee and Risk Management Committee prepare the annual report and then furnish it to the Board of Commissioners.

The Working Program of Risk Monitoring Committee of 2007 was to review the Policy,

atas Kebijakan Komite Manajemen Risiko dan Pedoman, Manual, Prosedur Manajemen Risiko yang telah dibuat serta membandingkan dengan penerapannya.

Sesuai dengan surat KPR kepada Dewan Komisaris No. 001/KPR/KOM/XI/2007 tanggal 16 November 2007 disebutkan bahwa penerapan Pedoman Kebijakan dan Manual Manajemen Risiko pada umumnya telah sejalan dengan Pedoman Kebijakan Manual Manajemen Risiko yang telah disusun. Dalam surat tersebut disampaikan pula oleh KPR bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen yaitu antara lain terutama monitoring/pengawasan melekat oleh atasan kepada subordinate-nya atas realisasi pembiayaan yang telah diberikan.

c. Komite Remunerasi & Nominasi (KRN)
Sesuai SK Direksi No. 008A/KOM/KPTS/VIII/2007 tugasnya adalah sebagai berikut :

- (a) Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Kru Senior.
- (b) Mengajukan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan dari Pemegang Saham.
- (c) Mengevaluasi secara periodic jumlah anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
- (d) Mempersiapkan proposal penunjukan atau penunjukan ulang anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.
- (e) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

Guidelines, Manual, and Procedures of Risk Management by comparing them against the actual implementation.

The letter of Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners No. 001/KPR/KOM/XI/2007, dated November 16, 2007 described that the implementation of Policy Guidelines and Manual for Risk Management, in general, consistent with Policy Guidelines and Manual for Risk Management compiled. Through the letter, the Risk Monitoring Committee also clarified that there were several items need to have management's special attention, among others, close monitoring of superintendent over his/her subordinates regarding the realization of financing made.

c. Remuneration & Nomination Committee
Pursuant to the Decision Letter of Board of Directors No. 008/KOM/KPTS/VIII/2007, the following are tasks of Audit Committee:

- (a) Determining the selection criteria and nomination procedures for members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Senior Officers,
- (b) Proposing nominations of members of Board of Commissioners and Directors, through the Board of Directors, to Bank Indonesia and shareholders before the General Meeting of Shareholders takes place by carefully taking into consideration the proposition of shareholders,
- (c) Periodically evaluate the number and composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors,
- (d) Preparing the proposal of appointment or reappointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors to shareholders,
- (e) Evaluating the remuneration policy,

(f) Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai :

- Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi disampaikan kpd RUPS.
- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan ke Direksi.

(g) Yang terkait dengan kebijakan nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

(f) Furnish the Board of Commissioners with recommendations regarding the following issues:

- The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders,
- The remuneration policy for Executive Officials and all of BMI's employees to be submitted to the Board of Directors.

(g) Carrying out activities associated with the nominations policy as follows:

- To compile and provide recommendations concerning system and procedure of appointment and or replacement of members of Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders,
- To furnish the Board of Commissioners with recommendations on candidates of members of Board of Commissioners and/or Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Abbas Adhar : Ketua Komite Remunerasi & Nominasi
2. Iskandar Zulkarnain. SE. Msi : Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
3. Oktavian Zamani : Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
4. Kalamuddinsjah : Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Penunjukan KRN di atas telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang menyebutkan antara lain susunan dan kriteria dari anggota KRN adalah paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota, 1(satu)

The following are names of members of Remuneration & Nomination Committee:

1. Drs. H. Abbas Adhar : the Chairperson of Remuneration & Nomination Committee,
2. Iskandar Zulkarnaen, SE. MSi : Member of Remuneration & Nomination Committee,
3. OktavianZamani:Member of Remuneration & Nomination Committee, and
4. Kalamuddinsjah: Member of Remuneration & Nomination Committee.

The appointment of the above-listed members of Remuneration & Nomination Committee has been consistent with applicable rules and regulations which specify that members of Remuneration & Nomination Committee shall comprise of at least one Independent

orang Komisaris dan 1(satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Unit Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principles) dipimpin oleh Kru Senior Compliance yang beranggotakan Kru / Staf dibeberapa unit kerja. Adapun tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam uraian secara umum mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)/Anti Money Laundering antara lain adalah untuk membantu tugas Direktur Kepatuhan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya Bank selalu berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tampak dari kebijakan, sisdur yang dibuat dimana seluruh isi yang ada dalam kebijakan/sisdur mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Fungsi kepatuhan dan KYC Principles berada dalam satu wadah yaitu Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko (CRMU). Unit ini selalu memantau pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit lain. Selain itu unit ini selalu mengikuti rapat-rapat seperti di Komite Pembiayaan dan komite-komite lainnya serta selalu memberikan masukan melalui memo-memo secara langsung maupun tidak langsung, agar selalu berpedoman kepada ketentuan internal maupun eksternal khususnya di bidang perbankan. Direktur Kepatuhan selalu mengingatkan kepada seluruh unit kerja agar menyampaikan laporan tepat waktu dan selalu memenuhi komitmen serta

Commissioner holding position as both the Chairperson and a member, one Commissioner, and one Executive Official controlling the human resource and one employee representative.

3. Implementation of Compliance, Internal Audit, and External Audit Functions

a. Compliance and Implementation Unit of Knowing Your Customers Principles (KYC) is presided over by a Compliance Senior Officer. The unit's members are staff/Officer from several working units. The tasks and responsibilities of the unit, as specified in general description on the Implementation of Knowing Your Customers Principles (KYC)/Anti-Money Laundering, among others, are to provide assistance to Compliance Director in assuring that, in its daily activities, Bank Muamalat consistently comply with applicable rules and regulations. This is reflected from policy, system, and procedure of BMI that fully abide with Bank Indonesia regulations. The compliance function and Knowing Your Customers Principles (KYC) exist in the same unit, namely Compliance and Risk Management Unit (CRMU). This unit continuously monitors the reporting made by other units. In addition, this unit consistently attends the meeting held, among others, by Financing Committee and other committees, whilst continuously provide inputs by means of memos, either directly or otherwise, to ensure that BMI constantly adhere both internal and external provisions, particularly those of applicable in banking sector. The Compliance Director always reminds all working units to submit all report in-timely basis inline with commitment and constantly ahead the targeted date in responding the findings

menepati target date dalam menjawab hasil temuan pemeriksaan dari Bank Indonesia. Direktur Kepatuhan selalu memberikan laporannya kepada Direktur Utama atas semua tugas yang dilaksanakan baik lisan maupun tulisan seperti Laporan Transaksi Keuangan Tunai/Mencurigakan setiap bulan dan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan setiap semester.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi audit intern dilakukan oleh Internal Audit Group (IAG) pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank. Hal ini dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun dan disetujui oleh Direktur Utama serta telah dilakukan secara rutin, berkesinambungan dan efektif. Dalam pelaksanaannya IAG melakukan pemeriksaan disemua bidang kegiatan secara berkala sedangkan pemeriksaan secara regular atau hari perhari dilakukan oleh Resident Auditor (RA) yang ditempatkan dicabang-cabang. Hasil temuan wajib difollow up oleh auditee dan dimonitor oleh IAG atas perbaikannya. Adapun posisi SKAI/IAG sendiri adalah merupakan lembaga yang independent terhadap satuan kerja operasional, hal ini dapat dilihat di struktur organisasi langsung dibawah Direktur Utama. Tugasnya selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB, Kebijakan & Prosedur Pemeriksaan serta dilakukan selalu atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya dan yang tertuang dalam RKAT IAG.

c. Fungsi Audit Ekstern

Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik antara lain adalah kapasitas harus mempunyai kerjasama International

of Bank Indonesia's inspection. The Compliance Director consistently furnish the President Director with report on all tasks done, either orally or written, such as monthly Cash/Suspicious Financial Transaction Report and Semi-annually Report of Compliance Director's Tasks Implementation Points.

b. Internal Audit Function

The internal audit function is carried out by Internal Audit Group (IAG) on all aspects and elements of the bank's activities. The internal audit is done in routine basis, constantly, and effectively based on audit planning set forth and approved by President Director. In auditing, the IAG performs inspection in all facets of bank's activities periodically. Meanwhile, regular or daily inspection is carried out by Resident Auditor (RA) designated in all branches. It is mandatory for auditees to follow up all audit findings, whilst the improvement efforts are monitored by the IAG). The SKAI/IAG is an independent entity towards operational working units, which can be seen from BMI's organizational structure. The entity is under direct supervision of BMI's President Director. In doing the tasks and obligations, The SKAI/IAG consistently complies with applicable guidelines, e.g. SPFAIB, as well as Audit Procedure and Policy and is based on predetermined audit plan and that of specified in RKAT IAG.

c. External Audit Function

The Public Accountant and Public Accountant Office is deemed qualified if met several aspects, among others, having international cooperation (BMI's

(syarat BMI), dilakukan dengan membuat perjanjian kerja, yang juga menetapkan ruang lingkup audit yang telah disyaratkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005.

Selain itu dipersyaratkan pula bahwa pelaksanaan audit harus sesuai dengan ketentuan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, serta aspek komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik sesuai Peraturan Bank Indonesia. Dalam proses penunjukan KAP ini Komisaris mendapat amanat dari RUPS yaitu bahwa sesuai hasil RUPS tanggal 25 April 2006 dinotarilkan dengan notaries Ary Supratno No. 100 diputuskan RUPS memberikan mandat kepada Komisaris untuk memilih KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank.

Selama tahun 2007 program GCG telah diterapkan dan diupayakan terus untuk meningkatkan peranannya dalam mendukung pengawasan serta pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan. Hal ini dapat lihat dalam pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun rapat khusus yang diadakan oleh organisasi GCG seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta Komite-komite Khusus yang dibentuk oleh dewan Direksi pada level Direksi maupun Senior Manajemen.

requirement), audit shall be carried out under a work agreement defining the scope of audit. Such condition is required by Bank Indonesia through Bank Indonesia Regulation No. 32/22/PBI/2001 dated December 13, 2001 as lastly amended by Bank Indonesia Regulation No. 7/50/PBI/2005 dated November 29, 2005 concerning Transparency of Bank's Financial Condition and Bank Indonesia Circular Letter No. 7/57/DPbS dated December 22, 2005.

It is also required that audit implementation shall be in conformity with auditing standards determined by Indonesian Accountant Association, as well as communication aspects between Bank Indonesia and Public Accountant Office according to Bank Indonesia Regulation. In the appointing process of Public Accountant Office, the Board of Commissioners is mandated by the General Meeting of Shareholders (GMOS) based on the resolutions of GMOS of April 25, 2005 which is recorded in notarial deed No. 100 by Ary Supratno, a public notary. The GMOS has come up with a resolution of giving a mandate to the Board of Commissioner to appoint a Public Accountant Office to audit the Bank's Financial Statements.

In the course of 2007, the GCG program has been implemented and continuously improved to enhance its roles in supporting the monitoring and implementation of company's internal control. This can be observed from routine or special meetings convened by GCG organizations, such as Board of Commissioners, Board of Directors, Islamic Supervisory Council, and Special Functioning Committees formed by the Board of Directors at Director or Senior Management level.

4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Dalam pelaksanaan manajemen risiko di BMI didasarkan atas Kebijakan dan Manual Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang telah disusun BMI sejak tahun 2004. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana kepada semuan bank diwajibkan untuk melaksanakan dan menerapkan manajemen risiko dalam seluruh kegiatan usahanya. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BMI tercermin antara lain dari sebagai berikut :

- a. Penetapan limit atau wewenang untuk memutus pembiayaan dari tingkat Business Manager sampai pada tingkat Komisaris,
- b. Pembagian tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang jelas sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi BMI,
- c. Adanya risk taking unit masing-masing untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terutama pada risiko kredit (oleh FSG), risiko operasional (Resident Auditor/ADM) dan risiko pasar (oleh treasury),
- d. Dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab dalam setiap unit kerja/unit bisnis maka pengawasan melekat atau sistem pengenalian intern telah melekat pada setiap atasan yang berada dalam organisasi tersebut,
- e. Selama tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya BMI telah menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia, sebagaimana diwajibkan dalam PBI tersebut di atas, walaupun pengukurnya masih secara manual. Namun demikian sesuai dengan program kerja Risk Management Unit,

4. Implementation of Risk Management and Internal Control System

The BMI's Risk Management is implemented based on Policy and Manual of Risk Management Implementation Procedure set forth by the company itself in 2004. This is aligned with provisions enclosed in Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, whereby all banks are required to implement and put into practice the risk management in all of their business activities. The implementation of policy carried out by BMI is reflected as follows:

- a. Determination of limit or authority to make decision on financing ranging from Business Manager to the Commissioner level,
- b. A clear distribution of tasks and responsibilities as enclosed in BMI's organizational structure,
- c. The presence of risk taking unit to perform identification, assessment, monitoring, and controlling, especially in term of credit risk (by FSG), operational risk (by Resident Auditor/ADM) and market risk (by treasury),
- d. With the presence of tasks and responsibilities segregation in each working unit/business unit, close monitoring or internal controlling system has been automatically attached to each superintendent in respective units,
- e. During 2007 and years before, BMI compiled and submitted Risk Profile Report to Bank Indonesia, as required by the above mentioned Bank Indonesia Regulation, even though the appraisal was carried out manually. However, inline with working program of Risk Management Unit, in 2008, BMI will start to build an

pada tahun 2008 ini BMI akan memulai membuat sistem informasi manajemen risiko secara terintegrasi dan diharapkan dalam tahun 2010 menjelang penerapan Basel II, sistem ini telah dapat berjalan.

- f. BMI secara terus menerus telah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kru-nya dalam bidang manajemen risiko. Sampai dengan saat ini kru yang telah lulus mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko tercatat sebanyak 127 orang terdiri dari level 1 sebanyak 108 orang dan level 2 sebanyak 19 orang termasuk 2 orang Direktur. Sementara itu untuk program ekskutif bagi Komisaris dan Direksi telah diikuti oleh 1 orang Komisaris dan 2 orang Direksi.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure).

Dalam rangka melaksanakan prudential banking dalam pemberian pembiayaan dan sebagai bank yang melaksanakan prinsip syari'ah, BMI selalu berupaya untuk lebih konservatif dalam menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaannya. Hal ini telah diatur dalam Kebijakan Umum Penanaman dana (KUPD) bank yaitu antara lain maksimum pembiayaan yang diberikan adalah 70% dari BMPK menurut ketentuan yang ditetapkan oleh BI, dan setiap bulannya FSG (Financing Settlement Group) menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung dari posisi modal bank pada bulan sebelumnya. Namun demikian Bank dapat membiayai nasabah s/d kurang dari BMPK dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dan aspek prudentialitas. Selama tahun 2007 penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada nasabah besar tercatat sebagai berikut:

integrated risk management information system and is expectedly the system will start its operation in 2010 as the anticipation of the implementation of Basel II,

- f. BMI continuously strive its best to upgrade its personnel's knowledge and skill in the field of risk management. Until this moment of time, there are 127 personnel graduated risk management certification test, consisting of 108 personnel representing level 1, and 19 personnel, including two Directors, representing level 2.

5. Provisioning of Funds for Related Party and Provisioning of Funds for Large Exposure

In order to implement the prudential banking in fund provisioning and its capacity as bank implementing Islamic principles, BMI consistently gives effort to be more conservative in determining its maximum limit for financing activities. This has been arranged in General Policy for Fund Investment (KUPD) of bank, that is, among others, maximum limit for eligible financing is 70% of Maximum Legal Lending Limit (BMPK) as stipulated through Bank Indonesia. In every month, The Financing Settlement Group confirm to all related units concerning maximum limit for eligible financing, which is counted from the bank's previous month capital position. However, the Bank could provide funds to its customers upto less than the limit determined by BKPM, by continuously supervise the level of risks and prudentiality aspect. During 2007, fund provisioning to related party and to major customers were recorded as follows:

PENYEDIAAN DANA FUND PROVISIONING	JUMLAH AMOUNT	
	DEBITUR DEBTORS	NOMINAL (JUTAAN RUPIAH/IN MILLION RP)
Kepada Pihak Terkait/To Related Party	*) Daftar Terlampir/The List is Enclosed	
Kepada debitur inti / To Core Debtors : a. Individu/Individual b. Group	*) Daftar Terlampir/The List is Enclosed *) Daftar Terlampir/The List is Enclosed	

6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank termuat dalam rencana jangka menengah / sedang dan rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah/ sedang BMI tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang dikirimkan kepada Bank Indonesia setiap tahun. Sementara itu rencana jangka panjang tercantum dalam rencana korporasi (Corporate plan). Kedua rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makro dan mikro ekonomi domestik maupun internasional, industri perbankan nasional dan juga faktor internal seperti jumlah jaringan cabang, aliansi, produk dan jasa, sumber daya insani. Rencana bisnis BMI untuk tahun 2007 s/d 2009 telah disampaikan kepada BI pada bulan Januari 2007 dengan surat No.072/DIR/BMI/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 sedangkan Rencana Korporate untuk tahun 2008 s/d 2013 telah pula dibuat. Adapun bentuk, isi dan format Rencana Bisnis maupun Corporate Plan telah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana di atur dalam PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

- a. Dalam menjalankan bisnisnya BMI senantiasa dilandasi oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga semua informasi tentang kondisi keuangan

6. Bank's Strategic Planning

The bank's strategic planning is enclosed in mid-term planning and long-term planning. The BMI's mid-term planning is enclosed in Bank's Business Planning which is annually submitted to Bank Indonesia. Meanwhile, The BMI's long-term planning is enclosed in Bank's Corporate Planning. Those two planning are set forth by taking into account external factors, such as micro and macro economic conditions at both domestic and international, national banking industries as well internal factors, such number of branches, alliance, goods and services, and human resources. The BMI's business plan for 2007 - 2009 furnished to Bank Indonesia in June 2007 through its letter No. 072/DIR/BMI/I/2007 dated January 30, 2007. On the other hand, BMI's Corporate Plan for 2008 - 2013 has been made as well. Form, contents, and format of BMI's Business Planning or Corporate Planning has been aligned with Bank Indonesia provision as referred to in PBI No. 6/25/PBI/2004 dated October 22, 2004 regarding Business Plan for Commercial Banks.

7. Transparency of Financial and Non-Financial Conditions Which Have Not Been Disclosed Yet In Any Other Reports.

- a. In doing its business, BMI is constantly referring to applicable rules and regulations. Hence, all information regarding the bank's financial and non-

maupun kondisi non keuangan selalu dipaparkan baik dalam laporan publikasi maupun laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005. Laporan tahunan tersebut selalu di audit oleh akuntan publik yang independen dan telah terdaftar di Bank Indonesia serta selalu dicantumkan dalam website BMI (muamalatbank.com). Selain itu laporan dimaksud disampaikan kepada seluruh stakeholder sebagaimana diatur dalam Keputusan BAPEPAM No.36/PM/2003 tanggal 30 September 2003.

- b. Informasi lain yg memang tidak dilaporkan karena hal ini tidak ada di BMI seperti:
 - Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada bank tersebut, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/ atau Pemegang saham Pengendali Bank.
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, memperoleh paket remunerasi berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya.

Untuk tahun 2007 total paket remunerasi & Nominasi adalah sebagai berikut :

financial conditions are consistently disclosed, either by means of publication report or annual report, as specified in PBI No. 7/50//PBI/2005 dated November 29, 2005. The aforesaid Annual Report is always audited by an independent public accountant, listed in Bank Indonesia, and is constantly highlighted in BMI's website (muamalatbank.com). In addition, such annual report also distributed to all shareholders as referred to in the Decision of BAPEPAM No. 36/PM/2003 dated September 30, 2003.

- b. Other information unreported due to their inexistence in BMI are as follows:
 - The shares ownership of members of Board of Commissioners and Board of Directors that is 5% or more exceeding authorized capital in the BMI, other banks, other financial institution non-banks, and other companies,
 - Financial and family relationship of members of Board of Commissioners and Board of Directors with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and/or BMI's controlling shareholders.
- c. Each member of Islamic Supervisory Council, Board of Commissioners, and Board of Directors is subject to the resolutions of General Meeting of Shareholders, and is acquiring remuneration packages in form of salary, allowances, and other facilities.

The following are total packages for remuneration & nomination of 2007 :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TYPE OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES ATTACHED FOR EACH MEMBER OF BOARD COMMISSIONERS AND
BOARD OF DIRECTORS

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN TYPE OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN AMOUNT RECEIVED IN ONE YEAR			
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
	ORANG PERSONS	JUTAAN RUPIAH AMOUNT IN MILLION RUPIAHS	ORANG PERSONS	JUTAAN RUPIAH AMOUNT IN MILLION RUPIAHS
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem and other facilities in form of non-natura)	5	2.991	5	14.481
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi asuransi kesehatan dan sebagainya) yangf *) / Other Facilities in form of natura (housing, transportation, health insurance, etc.) which *) a. Dapat Dimiliki / Can be owned b. Tidak dapat dimiliki / Can not be owned	-	-	5	3.250

*) Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah / Valued in Rupiah Denomination

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENERIMA PAKET REMUNERASI SELAMA TAHUN 2007
THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS RECEIVING REMUNERATION PACKAGES DURING 2007
(UNIT IN PERSON)

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN *) AMOUNT OF REMUNERATION PER PERSON IN A YEAR *)	JUMLAH DIREKSI NUMBER OF BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS	JUMLAH KOMISARIS NUMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEMBERS
Diatas Rp. 2 miliar / Above Rp 2 billion	5 orang	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar / Between Rp 1 billion to Rp 2 billion	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar / Between Rp 500 million to Rp 1 billion	-	5 orang
Rp. 500 juta ke bawah / Up to Rp 500 million	-	-

*) Yang diterima tunai / Received in cash

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Type of Remuneration and Other Facilities Attached for Each Member of Board Commissioners and Board of Directors

- d. Share option selama tahun 2007 tidak pernah dilakukan.
- e. Rasio gaji tertinggi dan terendah di BMI sesuai grade maksimum masing-masing kru tercatat sebagai berikut :
 - Rasio gaji pegawai tertinggi 100% dan terendah 15%
 - Rasio gaji Direksi tertinggi 100% dan terendah 80%

- d. During 2007, no share option ever been made,
- e. Ratio between the highest and the lowest salaries in BMI is aligned with maximum grade of respective personnel and is recorded as follows:
 - The ratio for the highest employee's salary is 100% and the lowest is 15%,
 - The ratio for the highest Director's salary is 100% and the lowest is 95%,

- Rasio gaji Komisaris tertinggi 100% dan terendah 15%
 - Rasio gaji Direksi tertinggi 100% dan pegawai tertinggi 60%.
- The ratio for the highest Commissioner's salary is 100% and the lowest is 15%,
- The ratio for the highest Director's salary is 100% and the highest employee's salary 60%.

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Rapat dewan komisaris yang diadakan selama tahun 2007 tercatat sebanyak 7 (tujuh) kali dan keseluruhannya adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri secara fisik lengkap oleh seluruh anggota, termasuk Komisaris dari IDB dan DR. Ahmed Abisourour.

g. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Selama tahun 2007 ini penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (outsourcing) terkait dengan proses verja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan (>Rp100 juta) tercatat sebagai berikut:

- f. The Frequency of Board of Commissioners' Meetings

In 2007, there were seven Board of Commissioners' meetings recorded. Two among them were attended physically by all members of Board of Commissioners, including from IDB and Dr. Ahmed Abisourour.

g. The Number of Internal Fraud

In the course of 2007, fraudulent actions conducted by management, permanent or temporary employees (outsourcing) related to the working process and bank's operational activities which significantly affecting the bank's financial condition (> Rp100 million) were recorded as follows:

INTERNAL FRAUD DALAM 1 (SATU) TAHUN INTERNAL FRAUD WITHIN A YEAR	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH NUMBER OF CASES CONDUCTED BY					
	PENGURUS MANAGEMENT		PEGAWAI TETAP PERMANENT EMPLOYEE		PEGAWAI TIDAK TETAP TEMPORARY EMPLOYEE	
	THN SEBELUMNYA IN PREVIOUS YEAR	THN BERJALAN IN CURRENT YEAR	THN SEBELUMNYA IN PREVIOUS YEAR	THN BERJALAN IN CURRENT YEAR	THN SEBELUMNYA IN PREVIOUS YEAR	THN BERJALAN IN CURRENT YEAR
Total Fraud	-	-	-	-	1	-
Telah diselesaikan / Has been settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank / Under the internal settlement process of the bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya / No Action has been taken yet for the settlement	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / Being followed-up through a legal process	-	-	-	-	1	-

h. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi BMI selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

h. Legal Cases

The legal cases faced by BMI during 2007, either civil law or criminal law, are recorded as follows:

PERMASALAHAN HUKUM LEGAL CASES	JUMLAH BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTOR MEETING	
	PERDATA CIVIL LAW	PIDANA CRIMINAL LAW
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Has been concluded (having permanent and binding forces of law)	1	2
Dalam proses penyelesaian / Under the settlement process	-	-
Total	1	2

i. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2007 di BMI tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini disebabkan karena setiap klausul dalam perjanjian/kontrak dan konsensus, baik dengan pihak internal maupun eksternal, sudah dicantumkan didalamnya.

i. Transactions having Conflict of Interest
No transaction having conflict of interest occurred in 2007. This was due to the fact that in every agreement/contract and consensus, either by internal or external party, these sorts of clauses are consistently enclosed.

j. Buy Back shares/Buy Back Obligasi & Corporate Social Responsibility (CSR).

- Selama tahun 2007 di BMI tidak pernah melakukan transaksi Buy Back shares dan Buy Back Obligasi yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan BMI. Namun telah terjadi transaksi Buy Back Obligasi pada tanggal 1 Maret 2007, sejumlah Rp3 miliar, untuk membeli kembali sebagian obligasi BMI. Langkah ini juga diambil sebagai kelanjutan dari penarikan obligasi yang dilakukan pada tahun 2006.

- Sebagai tanggung jawab sosial BMI kepada masyarakat (Corporate Social Responsibility/CSR), setiap tahun secara berkelanjutan BMI selalu melaksanakan program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid) disamping

j. Buy Back Shares/Buy Back Bonds & Corporate Social Responsibility (CSR).

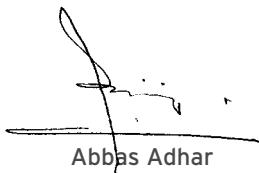
- No buy back shares transaction took place in 2007. However, there was a buy back obligations transaction taking place on March 1, 2007 with the amount to Rp3 billion to redeem a portion of obligations issued by BMI. The action also taken as a part or a continuation of withdrawal/settlement of bonds carried out in 2006.
- As a form of BMI's social responsibility towards community (Corporate Social Responsibility), each year, regularly, BMI implement the KUM3 Program (Mosque-Based Muamalat's Micro Business Community) a side of providing assistance for natural disaster mitigation in the country. The program is aimed at developing and empowering micro

memberikan bantuan menangani bencana yang terjadi di tanah air.. Program KUM3 ini diarahkan kepada pembinaan serta dukungan yang diberikan dalam rangka memberdayakan usaha mikro dan pengusaha kecil. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial tersebut selama tahun 2007 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya terinci untuk KUM3 berjumlah sebesar Rp 12 miliar dan untuk dana kemanusiaan/ bencana alam di seluruh Indonesia tercatat sebesar Rp 9,6 miliar. Seluruh dana sosial tersebut bersumber dari ZIS yang dikumpulkan oleh BMI dan kemudian disalurkan oleh BMI bersama Baitul Mal Muamalat dalam bentuk kedua program tersebut di atas.

businesses and small scale entrepreneurs. Funds disbursed for social activities in 2007, as previous years, was RP12 billion for KUM3 Program and Rp9.6 billion allocated for the program of humanitarian aids/natural disasters mitigation effort throughout the country respectively. The whole social funds was taken from ZIS (Alms, Donations, and Charities) garnered by BMI to be disbursed together with Baitul Mal Muamalat in form of the above mentioned two programs.

Jakarta, May 26, 2008

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.



Abbas Adhar

Komisaris Utama / President Commissioner



A. Riawan Amin

Direktur Utama / President Director

LAPORAN PENYEDIAAN DANA
SOURCE OF FUNDS REPORT

NAMA BANK : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
BULAN LAPORAN : DESEMBER 2007

NAMA PEMINJAM NAME OF SENIOR OFFICER	HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BANK NAME OF SENIOR OFFICER	PADA TANGGAL LAPORAN BOARD	
		PENYEDIAAN DANA DALAM BOARD	
		RUPIAH / RUPIAH	VALAS / VALAS
Ma'ruf Amin, KH	DPS	22	-
Achmad Riawan Amin	Direktur Utama	636	-
Arviyan Arifin	Direktur	2,479	-
Andi Buchari	Direktur	488	-
Delyuzar Syamsi	Asdir	210	-
Avantiono Hadhianto	Asdir	300	-
Total		4,135	-
Yayasan Baitulmaal Muamalat	Direksi	51	-
		54	-
		68	-
		149	-
		23	-
Total		344	-
Internusa Hasta Buana, PT	Komisaris	-	82
		-	20
		441	-
Total		441	102
Internusa Intan Segara, PT	Komisaris	19,500	-
Total		19,500	-
Karya Bangun Sejahtera, PT	Business Manager	497	-
		970	-
		1,278	-
		500	-
Total		3,244	-
BPRS Dinar Ashri	Branch Coordinator	311	-
		903	-
		1,214	-

NAMA PEMINJAM NAME OF SENIOR OFFICER	HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BANK NAME OF SENIOR OFFICER	PADA TANGGAL LAPORAN BOARD	
		PENYEDIAAN DANA DALAM BOARD	
		RUPIAH / RUPIAH	VALAS / VALAS
BPRS Wakalumi	Komisaris	175	-
		399	-
		310	-
		443	-
		410	-
		2,300	-
		1,675	-
		1,929	-
Total		7,642	-
BPRS PNM Mentari	Komisaris	17	-
		37	-
		280	-
		335	-
Total		670	-
BPRS Daya Artha Mentari	Komisaris	9	-
		75	-
		90	-
		51	-
		43	-
		364	-
		325	-
		733	-
		630	-
		443	-
Total		2,762	-

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.
 LAPORAN PEMBIAYAAN KELompOK DEBITUR BESAR PER AKHIR DESEMBER 2007
 REPORT OF THE FUNDING ACTIVITIES FROM MAJOR DEBTOR AS OF DECEMBER 2007

NO NUMBER	NAMA NAME	BAKI DEBET (JUTAAN RP) (JUTAAN RP)
1	Kartika Selabumi Mining	186,481.00
2	Agis Elektronik PT	184,959.00
3	PT. Aldira Berkah Abadi Makmur	175,506.00
4	Trigana Air Service	165,861.00
5	Indonesia Air Transport	140,700.00
6	Indo Matra Power, PT	137,502.00
7	PT Mayasari Bakti	118,525.00
8	PT RTM Global Integration	104,852,30
9	Bhakti Finance, PT	104,009.00
10	Alam Sutera Realty, PT	100,000.00
11	Transamudra Usaha Sejahtera PT	99,394.00
12	Buana Centra Swakarsa PT	97,567.00
13	Altra Excis Investama PT	84,469.00
14	Intan Baruprana Finance	74,587.00
15	PT Trans Pacific Jaya	71,592.00
16	PT Manunggal Energi Nusantara	70,495.11
17	Lingga Jati Al Manshurin	69,378.00
18	BNI Multi Finance PT	65,290.00
19	PT Riau Airlines	63,349.00
20	PT Global Lestari Motorindo	62,003.00
21	PT Sinar Dinamika Kapuas (KUD Bondo Sepolo)	58,721.00
22	Pelayaran Camar Laut	58,302.00
23	PT Adimas Kertajaya	54,761.00
24	Mega Power Mandiri PT	50,622.00
25	PT Bahtera Marina Perkasa	48,875.00
26	Ragam Logam, PT	47,512.00
27	PT Varindo Buana Abadi	46,734.00
28	Yayasan Citra Bangsa	43,618.00
29	KUD Wulanderi	42,147.00
30	PT Adhimix Precast Indonesia	39,692.00
31	Industira, PT	38,765.00
32	Mercusuar Lintasindo	36,652.00
33	PT RTM Inti Corpora	36,301.00
34	PT Telekomindo Primakarya	35,650.00
35	Satria Bahana Sarana	35,229,21
36	Bayu Buana Gemilang	34,266.00
37	Harvesia Aktiva Finance PT	33,456.00
38	Andi Arta, PT	32,642.00
39	Adhirama Cipta, PT	32,094.00
40	PT Paramacitra Murniabadi	31,696.00
41	PT Kertabumi Teknindo	29,083.00
42	PT Amanah Finance	27,751.00
43	Bima Nusa Internasional, PT	27,592.00
44	Sarana Inti Persada	27,416.00
45	Buana Centra Steel Industry	27,225.00
46	PT Bina Duta Sinergi	25,511.00
47	Mega Tower, PT	25,083.00
48	Rasyid Abdullah, SE	25,000.00
49	Buana Fajar baja, PT	24,535.00
50	Radionet Cipta Karya	23,670.00
Jumlah		3,277,120,84

PENYEDIAAN DANA KEPADA DEBITUR INTI (GROUP) PER DESEMBER 2007
FUNDING TO THE MAJOR DEBTOR (GROUP) AS OF DECEMBER 2007

NO NUMBER	NAMA GROUP DEBITUR NAME	PIHAK TERKAIT NAME	OUTSTANDING NAME
1	PT Mayasari Bakti	PT Mayasari Bakti	118,509,207,863.00
		PT Maya Saribakti Utama	21,795,528,893.39
		PT Graha Metal Utama	1,268,943,925.00
Sub Total			141,573,680,681.39
2	PT Gapuruning Rahayu	PT Gapuruning Rahayu	7,123,310,928.75
		PT Perkasa Jaya	1,302,357,799.89
		PO Putra Jaya	4,047,117,703.82
Sub Total			12,472,786,432.46
3	PT Humbahas Bumi Energi	PT Humbahas Bumi Energi	3,525,833,331
		PT Bintang Saudara	2,500,000,000
		Sub Total	6,025,833,331
4	PT Delta Surya Textil	PT Delta Surya Textil	12,407,533,674
		PT Bumi Casa Mining	1,903,669,458
		Sub Total	14,311,203,132
5	PT Tiedyasa Mitra Sejahtera	PT Tiedyasa Mitra Sejahtera	10,809,000,000
		Rachmat Gobel	756,785,714
		Sub Total	11,565,785,714
6	PT Buana Centra Swakarsa	PT Buana Centra Swakarsa	78,232,451,554
		HM Mardiono	4,343,594,119
		Yukki Nugrahawan	434,800,525
		Ivananto Effendi	726,474,696
		H. Embay M. Syarief	614,887,720
		PT Banten Mitra Angkasa	1,855,078,576
		H. Maskawi	548,684,851
		PT Graha Serang Asri	7,762,309,280
		PT Buana Centra Steel Industry	27,222,641,830
		PT Wale Jasa Pratama	1,733,885,443
		PT Cipta Niaga Internasional	13,647,374,069
		BPRS Baitul Muwanah	722,222,240
Sub Total			137,844,404,903
7	PT Agis Electronic	PT Agis Electronic	184,956,722,354
		PT Artha Centra Graha	11,884,255,000
		Sub Total	196,840,977,354
8	PT Daya Keisindo	PT Daya Keisindo	5,763,839,157
		Reza Rhenaldi Syaiful	2,430,270,507
		Andre Mirza Hartawan	806,651,366
		PT Auto Daya Amara	5,010,639,881
		PT Auto Daya Keisindo	10,014,508,928
		PT Pribumi Citra Megah Utama	15,197,133,395
		H. Norhin	3,430,836,567
		Bambang Yudiono Martono	726,373,260
		Sub Total	43,380,253,061

PENYEDIAAN DANA KEPADA DEBITUR INTI (GROUP) PER DESEMBER 2007
FUNDING TO THE MAJOR DEBTOR (GROUP) AS OF DECEMBER 2007

NO NUMBER	NAMA GROUP DEBITUR NAME	PIHAK TERKAIT NAME	OUTSTANDING NAME
9	PT Transamudra Usaha	PT Transamudra Usaha	99,392,956,818
		PT Trust Rekatama Indonesia	2,404,285,713
		Ahmad Farithin	570,990,984
		R. Kabal Yudhanegara	702,937,056
		Yayasan Darul Fallah	368,915,690
Sub Total			103,440,086,261
10	PT Altra Excis Investama	PT Altra Excis Investama	84,468,587,324
		PT Garuda TV Media	7,950,000,000
		PT Sarana International	8,500,000,000
		Sub Total	100,918,587,324
11	PT Indo Matra Power	PT Indo Matra Power	137,503,003,394
		PT Panggon Waja Utama	13,207,848,214
		Sub Total	150,710,851,608
12	PT Indomuda Satria Internusa	PT Indomuda Satria Internusa	13,759,825,974
		Haryanto	2,500,000,000
		Sub Total	16,259,825,974
13	PT Indopacific Mining Nusantara	PT Indopacific Mining Nusantara	28,110,000,000
		Hartono Darmawan	1,156,355,415
		Sonya Tania	824,623,444
		Sub Total	30,120,978,860
14	PT Bima Nusa International	PT Bima Nusa International	27,590,779,893
		PT Iwaco Jaya Abadi	14,472,377,242
		Sub Total	42,063,157,135
15	PT Bayu Buana Gemilang	PT Bayu Buana Gemilang	33,404,513,190
		PT Citra Nusantara Gemilang	457,395,280
		M. Zaky Firdaus	172,557,000
		Sabrun Jamil Amperawan	862,234,345
		Sub Total	34,896,699,815
16	PT Satria Bahana Sarana	PT Satria Bahana Sarana	42,503,842,907
		Putranto Sordarto	1,610,975,673
		Sub Total	44,114,818,580
17	PT Sinergy Tharada	PT Sinergy Tharada	8,020,405,083
		PT Synergy Telematika Nusantara	511,554,885
		M. Sonny Inayatkhan	612,828,789
		Reza Slamet Riyadi	6,792,000,000
		Sub Total	15,936,788,757

PENYEDIAAN DANA KEPADA DEBITUR INTI (GROUP) PER DESEMBER 2007
FUNDING TO THE MAJOR DEBTOR (GROUP) AS OF DECEMBER 2007

NO NUMBER	NAMA GROUP DEBITUR NAME	PIHAK TERKAIT NAME	OUTSTANDING NAME	
18	PT RTM Global Integration	PT RTM Global Integration	99,168,396,183	
		PT RTM Inti Corpora	36,300,248,623	
Sub Total			135,468,644,806	
19	PT Bunda Medik	PT Bunda Medik	5,525,976,838	
		Rizal Sini, DR. SpOG	841,117,921	
Sub Total			6,367,094,759	
20	PT Ceria Utama Abadi	PT Ceria Utama Abadi	2,153,359,693	
		PT Bina Rasano Engineering	32,817,005,019	
Sub Total			25,511,250,000	
Sub Total			60,481,614,712	
21	PT Radionet Cipta Karya	PT Radionet Cipta Karya	23,670,116,000	
		PT Jaringan Delta Female Ind.	8,379,371,055	
Sub Total			772,935,334	
Sub Total			32,822,422,389	
22	PT Mesana Transforex Int.	PT Mesana Transforex Int.	2,012,976,194	
		Melchias Markus	356,595,127	
Sub Total			2,369,571,321	
23	PT RS Dedy Jaya	PT RS Dedy Jaya	3,057,862,488	
		H. Muhadi Setiabudi	5,367,763,821	
Sub Total			8,425,626,310	
24	PT Aldira Berkah Abadi M.	PT Aldira Berkah Abadi M.	175,505,418,749	
		Andi Artha	32,640,735,001	
Sub Total			208,146,153,750	
Total			1,556,557,846,970	

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT GCG PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
POSI SI AKHIR BULAN DESEMBER 2007
SUMMARY OF COMPOSITE VALUE CALCULATION ON THE IMPLEMENTATION OF GCG SELF ASSESSMENT OF
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK AS OF THE YEAR ENDED DECEMBER 2007

ASPEK YANG DINILAI ASPECT TO BE VALUED	BOBOT VALUE	PERINGKAT RANK	NILAI VALUE	CATATAN *) NOTE *)
	(A)	(B)	(A) X (B)	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00	1	0.100	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dekom telah dipenuhi ses. kettn.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00	1	0.200	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dipenuhi ses. kettn.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00	1	0.100	Komite-komite telah dibentuk ses. SK Dekom dalam tahun 2007 dan telah melaksanakan tugas ses. piagam
Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	2	0.200	Bank memiliki kttn benturan kept. dan selalu dijalankan bank
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00	2	0.100	Fungsi kepatuhan bank telah dilaksanakan ses. ketentuan yang berlaku
Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00	2	0.100	Fungsi audit intern bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Penerapan Fungsi Audit Extern	5.00	2	0.100	Fungsi audit extern bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7.50	2	0.150	Penerapan manajemen risiko telah berjalan, profil risiko telah dilaporkan rutin ke BI, meski masih dibuat secara manual
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposur)	7.50	2	0.150	Tidak pernah terjadi pelanggaran dan atau pelampaunan BMPK. Diversifikasi & independensi telah diatur dalam pedoman (KUPD)
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	5.00	2	0.100	Laporan telah disampaikan ke stakeholder termasuk yang tidak diwajib oleh BI
Laporan Pelaksanaan GCG	5.00	2	0.100	Laporan Pelaksanaan GCG telah dibuat & disampaikan kepada BI sesuai ketentuan
Pelaporan Internal	5.00	2	0.100	SIM cukup memadai & Laporan dapat dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
Rencana Strategis Bank	5.00	2	0.100	Rencana Korporasi & RBB disusun sesuai ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit	100.00		1.60	Tata Kelola Baik/Memadai

*) berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana kolom (b)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Ketua Chairman

Lahir di Pati pada tahun 1937, Bapak K.H.MA Sahal Mahfudh menempuh pendidikannya di banyak pesantren di Indonesia. Pendidikan terakhirnya dilalui di pesantren di Sarang Rembang (1957-1960).

Dalam perjalanan karirnya, beliau banyak terlibat di bidang pendidikan, seperti Direktur Perguruan Islam Mathaliul Falah, Pati dan anggota BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional). Pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum MUI Pusat, Ketua Dewan Syariah Nasional dan juga Rektor INISNU, Jepara.

K.H. Ma'ruf Amin

Anggota Member

Lahir di Tangerang tahun 1943. Diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat pada tahun 2002. Setelah menyelesaikan studinya di Pesantren Tebu Ireng, belajar di beberapa Pesantren di Daerah Banten, dan menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Chaldun pada tahun 1967. Anggota DPR/MPR RI sejak tahun 1997 dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000. Pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional, Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment, serta Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT Bank BNI (Persero).

Born in 1937, in Pati, Central Java, K.H. MA Sahal Mahfudh received his education from various Islamic boarding schools. His last education was in the Islamic boarding school, Sarang Rembang (1957-1960).

His long career has been devoted to the academia, serving in several academic posts including Director of Islamic School Mathali ul Falah, Pati, and member of BPPN (The National Education Advisory Board). He is currently Chairman of the Central Board of the Indonesian Council of Ulemas, Chairman of the National Sharia Board and also served as Rector of INISNU, Jepara.

Born in Tangerang in 1943. Appointed as member of the Syariah Supervisory Board of Bank Muamalat in 2002. Following his study at Pesantren Tebu Ireng, he pursued further studies at several pesantren in the region of Banten, and in 1967 graduated from the Faculty of Ushuluddin, Ibnu Chaldun University. He became a member of the House of Representatives/People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia since 1997 and Chairman of the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulemas since 2000. Concurrently, he is also the Chairman of the Managing Body of the National Council of Syariah, member of Bank Indonesia Committee of Experts for the Development of Syariah Banking, Chairman of the Syariah Supervisory Board of PT Danareksa Investment and Chairman of the Syariah Supervisory Board of PT Bank BNI (Persero).

Prof. Dr. H. Muardi Chatib

Anggota Member

Lahir pada tahun 1933 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Guru Besar IAIN Jakarta ini menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 1999.

Memperoleh gelar doktor dari IAIN tahun 1989, dengan pengalaman mengajar selama 50 tahun, mulai dari guru Madrasah Tsanawiyah, PGA, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN, ABA, IKIP Muhammadiyah dan berbagai perguruan tinggi lainnya.

Sejak muda aktif dalam berbagai organisasi pelajar lokal, PII, Pramuka, Resimen Mahasiswa dan bagian Tabligh Muhammadiyah. Pada tahun 1999 beliau menjadi Ketua MUI Pusat Komisi Dakwah.

Prof. Dr. H. Umar Shihab

Anggota Member

Lahir di Rappang (Makassar) tahun 1939, Doktor Studi Hukum Islam dari Universitas Hasanuddin ini menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 1999.

Karir beliau dimulai dari Dosen IAIN (1963-kini), Anggota DPRD Tingkat I (1987-1992), anggota DPR (1987-1999), Dekan Fakultas Ushuluddin (1981-1989), Dekan Fakultas Syariah (1987-1991), Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (1992-1996) dan Direktur Pendidikan Kader Ulama (1994-1996).

Sejak muda beliau telah aktif dalam pergerakan Islam, mulai dari Pelajar Islam Indonesia (PII) (1960-1964), Ketua HMI cabang Makassar (1962-1963), Ketua Umum Jamiyyatul Ittihad Wal Ma'wanah (1971-1998), Ketua MUI Sulawesi Selatan (1987- 1998), Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat (1994-1999), hingga menjadi ketua MUI Pusat sejak 1998.

Born in 1933 in Bukit Tinggi, West Sumatera, Prof. DR. H. Muardi Chatib has been a member of the Sharia Supervisory Board since 1999.

He earned his PhD degree from IAIN in 1989. He has 50 years of teaching experience, starting from a teacher at Madrasah Tsanawiyah, Islamic Teaching School (PGA), lecturer at the Tarbiyah Faculty of IAIN, The Academy of Foreign Language (ABA), IKIP Muhammadiyah and several other universities.

Active in his youth in various student organisations, PII, Resimen Mahasiswa (ROTC) and section Tabligh of Muhammadiyah. In 1999, he became Chairman of the Dakwah Commission of the Central MUI.

Born in 1939 in Rappang (Makassar), Prof. DR. H. Umar Shihab obtained his PhD degree in Islamic Law from the University of Hasanuddin. He has been a member of the Sharia Supervisory Board since 1999.

His career started as lecturer at the IAIN (1963-present), member of regional House of Representatives (1987-1992), member of the House of Representatives (1987-1999), Dean of the Faculty of Ushuluddin (1981-1989), Dean of the Sharia Faculty (1987-1991), Rector of the Islamic University (1992-1996) and Educational Director of Ulama Cadre (1994-1996).

He has been active in Islamic movement since his youth, starting from Islamic Student Association (PII) (1960-1964), Chairman of the Makassar Business of the Association of Islamic University Students, HMI (1962-1963), Chairman of the Jamiyyatul Ittihad Wal Ma'wanah (1971-1998), Chairman of the South Sulawesi Chapter of the Indonesia Council of Ulemas (1987-1998), Deputy of the Indonesian Council of Mosques (1994-1999), and the Chairman of the Central Board of the Indonesian Council of Ulemas since 1998.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Drs. H. Abbas Adhar

Komisaris Utama

President Commissioner

Lahir di Sukabumi, Jawa Barat tahun 1935, Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia ini diangkat sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat sejak tahun 1999.

Meniti karir di bidang perbankan di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sejak tahun 1962 sebagai Staf III Sekretariat. Posisi terakhirnya adalah Direktur Muda dan Kepala Urusan Perkreditan sebelum akhirnya pensiun pada tahun 1992.

Berpengalaman menjadi komisaris di 4 perusahaan, termasuk di PT Industrial Gases Indonesia dan 2 lembaga perbankan, termasuk BPD Jawa Timur.

Pada tahun 1992 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT International Timber Corporation (ITCI), kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) pada tahun 1994, dan menjadi Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) dan Komisaris Bank Bukopin tahun 1998.

Prof. Korkut Ozal

Komisaris Commissioner

Profesor Korkut Ozal dilahirkan di Malatya, Turki, pada tahun 1929. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik Sipil, Technical University of Istanbul (ITU), pada tahun 1951.

Karir profesionalnya dimulai di Badan Pengembangan Pengairan, Lahan dan Tenaga

Born in 1935 in Sukabumi, West Java, H. Abbas Adhar graduated from the Faculty of Economics, University of Indonesia. He has been the President Commissioner of Bank Muamalat since 1999.

Started his banking career at Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) in 1962 as Secretariat Staff, his latest position was Junior Director and Head of Credit Division before retiring in 1992.

He has experience as Commissioner in four companies, including PT industrial Gases Indonesia and two banking institutions, including The Regional Development Bank of East Java.

In 1992 he became the President Director of PT International Timber Corporation. In 1994 he was Vice Chairman of the Indonesian Forestry Community. He became Chairman of the Indonesian Wood Panel Association (APKINDO) and Commissioner of Bank Bukopin in 1998.

Professor Korkut Ozal was born in Malatya-Turkey in 1929. On 1951 he graduated from the Technical University of Istanbul (ITU) with an advanced degree in Civil Engineering.

His long professional career started at the Ministry of Public Works of Turkey, at Water,

Listrik pada Departemen Pekerjaan Umum Turki. Selama masa kerja 10 tahun disana, beliau terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek bendungan, pembangkit listrik, pengendalian arus sungai, irigasi dan drainase.

Pada tahun 1961 beliau ditunjuk menjadi staf pengajar ahli di Middle East Technical University (METU), Ankara, sampai dengan tahun 1971. Pada tahun 1967, beliau juga sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama Turkish National Petroleum Corporation (TPAO), perusahaan migas dan petrokimia milik pemerintah Turki, sampai dengan tahun 1971.

Beliau menjadi anggota Parlemen Turki melalui Pemilihan Umum Anggota Parlemen pada tahun 1973 dan 1977. Selama delapan tahun aktif di politik, beliau sempat menjabat sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 1983, kakak laki-laki beliau menjadi pemimpin partai mayoritas, dan diangkat sebagai Perdana Menteri Turki. Antara tahun 1983-1987 beliau menjadi penasehat Perdana Menteri.

Sejak tahun 1983, beliau aktif dalam memperkenalkan tatanan ekonomi, perbankan dan keuangan Islamiah. Beliau mengembangkan prosedur operasional untuk Bank Islam di Turki. Beliau memiliki hubungan erat dengan Bank Pembangunan Islam (IDB), sebagai pendiri badan Pusat Informasi, Pelatihan dan Riset (IRTI) di IDB, serta sebagai Wakil Tetap Turki di Dewan Direktur Eksekutif IDB. Beliau aktif terlibat dalam pengembangan reksadana Islamiah, portofolio perbankan Islamiah, pembiayaan perdagangan jangka-panjang Islamiah, dan pembentukan Islamic Management Institute di Universitas Islam, Kuala Lumpur.

Land and Power Development Agency (DSI). During his 10 years of service there he has served in the planning, designing and implementing of various Dams, Power Plants, River Control and Irrigation and Drainage Systems.

At 1961 he was appointed as a teaching member of Middle East Technical University of Ankara (METU) where he has served until 1971. On 1967 in addition to his teaching he was appointed as the Chairman and CEO of Turkish National Petroleum Corporation (TPAO), an integrated Oil and Petrochemical Company of Turkish Government. He served there until 1971.

At 1973 and 1977 National Elections of Turkish Parliament (TBMM) he was elected as A Member of Parliament (MP). During his 8 years of active political life he has been appointed and served as the Minister of Agriculture and Minister of Interior of Turkey. In 1983 his elder brother entered politics as an elected majority party leader and became the Prime Minister of Turkey. During 1983-1987, he served as personal adviser to the Prime Minister.

Since 1983 he has been deeply involved in promoting Islamic Economy, Banking and Finance. He has developed the operating rules of Turkish Special Finance Houses (Islamic Banks). He is closely associated with the Islamic Development Bank (IDB), being the founding Father of the Research, Training and Information Center (IRTI) of IDB as well as the Permanent Representative of Turkey at the Board of Executive Directors of IDB. He is actively involved in the development of Islamic Unit Fund, Islamic Bank Portfolio, Islamic Long Term Trade Financing, and Islamic Management Institute of Islamic University at Kuala Lumpur.

Dr. Ahmed Abisourour

Komisaris Komisioner

Menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat sejak tahun 2006. Memperoleh gelar PhD dalam bidang Ekonomi dan Administrasi Bisnis (beasiswa Fulbright tahun 1978).

Beliau memiliki pengalaman selama 31 tahun dalam institusi internasional (IDB-Jeddah, BBI-Sarajevo, IMF-Washington, AMFAbu Dhabi, BM-Rabat...) dan pengalaman kerja lapangan di 34 negara. Beliau memiliki keahlian yang mengagumkan atas banyak bidang termasuk Islamic banking & finance, corporate strategies, manajemen portofolio investasi, Islamic treasury, investasi pada pasar yang sedang tumbuh berkembang, central banking, exchange regulations & currency pegs, kebijakan makro & perencanaan moneter negara.

Beliau memegang posisi manajer senior dan profesional serta juga kepemimpinan dan anggota dewan dalam beberapa institusi perbankan Islam yang selektif di seluruh dunia. Baru-baru ini, beliau memberikan kontribusinya pada IDB dengan memimpin pendirian beberapa institusi keuangan Islam di Afrika, Asia dan Eropa, yang merupakan elaborasi dari arsitektur bisnis Islam & rencana kerja tahunan dan penciptaan dari institusi infrastruktur pasar keuangan Islam (IIFM, IFSB).

Beliau adalah pembicara reguler di konferensi Islam internasional dan telah menerbitkan hasil karya tulisan pada bidang strategi perbankan Islam dan pasar modal yang sedang tumbuh berkembang. Tanggung jawab beliau saat ini adalah fokus untuk membantu Boubyan Bank dalam elaborasi antara strategi bisnisnya dan memikul tugas-tugas pengembangan bisnis internasional.

Commissioner of Bank Muamalat Indonesia since 2006. He earned his PhD in Economics and Business Administration (Fulbright scholar 1978).

He brings 31 years of international institutional experience (IDB-Jeddah, BBI-Sarajevo, IMF-Washington, AMF-Abu Dhabi, BM-Rabat...) and field work experience in 34 countries. He has acquired an impressive competency range spanning a variety of specialized fields including Islamic banking & finance, corporate strategies, investment portfolio management, Islamic treasury, investment in emerging markets, central banking, exchange regulations & currency pegs, macro policies & country financial programming.

He held senior managerial and professional positions as well as board chairmanship & membership in selective Islamic banking institutions worldwide. His recent contributions were completed at the IDB where he spearheaded the establishment of Islamic financial institutions in Africa, Asia and Europe, the elaboration of Islamic business architecture & annual work plans and the creation of Islamic financial market infrastructure institutions (IIFM, IFSB).

He is a regular speaker at international Islamic conferences and has numerous publications to his credit in the fields of Islamic banking strategies and emerging capital markets development. His shoulders key responsibilities at present focused on assisting Boubyan Bank in the elaboration of its business strategy and the undertaking of international business development tasks.

Drs. Aulia Pohan, M.A

Komisaris Commissioner

Lahir di Palembang, Sumatera Selatan tahun 1945, Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1969) dan Master Ekonomi Studi Pembangunan dari Boston University, Amerika Serikat (1982). Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2006.

Memulai karirnya di Bank Indonesia (1971 - 1977), beliau pernah menjabat sebagai Staf Gubernur Bank Indonesia (1978 - 1980), Associate Representative Bank Indonesia di Tokyo (1984 - 1988), Kepala Bagian Moneter Bank Indonesia (1988 - 1991), Wakil Kepala Urusan Ekonomi dan Statistik (1991 - 1994), Kepala Urusan Penelitian dan Pengembangan Intern (1994 - 1997), Direktur Bank Indonesia (1997 - Mei 1999), Deputi Gubernur Bank Indonesia (Mei 1999 - 2005).

Disamping itu, beliau juga sering mengikuti kursus-kursus, seminar, dan pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sampai dengan tahun 2005, beliau aktif mengikuti berbagai pertemuan baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, menjadi inisiator dan coordinator pengembangan dan penerapan White Paper dan Cetak Biru (Blue Print) serta Good Corporate Governance melalui implementasi Sistem Penilaian dan Manajemen Kinerja di Bank Indonesia.

Beliau juga pernah menjadi pengajar. Antara lain sebagai pengajar pendidikan intern BI untuk calon staf dan diklat lanjutan, dosen S1 dan S2 di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta, pengajar di Institut Bank Indonesia dan pengajar intern BI untuk diklat lanjutan dan SESPIBI.

Born in Palembang, South Sumatera in 1945, Aulia Pohan graduated as Bachelor in Economics from University of Indonesia (1969) and obtained his Master's degree from Boston University, USA (1982). He was President Director of Bank Muamalat (1991 - 1996). He became Commissioner from 2006.

Started his career in Bank Indonesia (1971 - 1977), he has been appointed as Governor Staff of Bank Indonesia (1978 - 1980), Bank Indonesia Associate Representative in Tokyo (1984 - 1988), Head of Bank Indonesia Moneter (1988 - 1991), Vice Chairman of Economic and Statistic (1991 - 1994), Head of Internal Research and Development (1994 - 1997), Director of Bank Indonesia (1997 - May 1999), Governor's Deputy of Bank Indonesia (May 1999 - 2005).

In addition, he attended some courses and seminars both local and international. Until 2005, Aulia Pohan was viable in many bilateral and multilateral forums, and also became an initiator and coordinator for developing and executing the White Paper and Blue Print as well as Good Corporate Governance through the implementation of Performance Management and Assessment System in Bank Indonesia.

He was also lecturing for some institutions such as the Bank Indonesia's internal scholastic for recruit staffs and extensive trainings, Bachelor's and Master's Degree in some private universities in Jakarta, in the Institute of Bank Indonesia and intern lecturer for extensive trainings and SESPIBI.

H. Iskandar Zulkarnain, S.E. M.Si

Komisaris Komisioner

Lahir di Malang, tahun 1961. Menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat sejak tahun 2004. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan memperoleh gelar S2 (Master) di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Beliau memulai karirnya sebagai tenaga pemasaran di Evergreen Line Shipping (1986 - 1989) dan kemudian sebagai General Manager di PT Internusa Cargo - EMKL (1989 - 1991). Setelah itu beliau menjabat sebagai Managing Director di PT Internusa Hasta Buana - International Freight Forwarding (1991 - sekarang).

Disamping itu beliau juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya: di Corps Alumni AIP, di DPP GAFEKSI/INFA (Indonesian Freight Forwarder Association), di Majelis Ekonomi PP-Muhammadiyah, di Forum Zakat (FOZ), di Badan Amil Zakat Nasional, di Baitul Maal Muamalat, di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan di El Makiyah Foundation.

Born in 1961 in Malang, East Java. Appointed as Commissioner of Bank Muamalat since 2004. He graduated from University of Indonesia with a degree in Economics in 1991, and received a Master's degree in Human Resources Development also from University of Indonesia in 2001.

Started his career as a Sales Executive with Evergreen Line Shipping (1986 - 1989) and a General Manager with PT Internusa Cargo - EMKL (1989 - 1991). Subsequently, he became the Managing Director at PT Internusa Hasta Buana - International Freight Forwarding (1991 - present).

In addition, he is also active in several organizations, including the Alumni Corps of AIP, the Indonesian Freight Forwarder Association (GAFEKSI/INFA), the Economic Council of PP Muhammadiyah, Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat Nasional, Baitul Maal Muamalat, the Sharia Economic Society (MES) and the El Makiyah Foundation.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

H. A. Riawan Amin, M.Sc - Direktur Utama President Director

Lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1958, A. Riawan Amin memperoleh gelar BSc di bidang Architectural Technology dari New York Institute of Technology, USA. Gelar master dibidang *Inter Disciplinary Study* diperolehnya dari University of Texas melalui program beasiswa. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 1999.

Perjalanan karirnya di Bank Muamalat dimulai sejak hari Jumat tanggal 10 November 1993 sebagai Kepala Divisi untuk bidang *Organization and Human Resources*, kemudian Vice President and Corporate Secretary (1996) dan Vice President Individual Banking (1998). Sebelumnya, beliau bergabung dengan Bank Duta (1989) dan Bank Universal (1992). Pada tahun 1987, beliau bekerja sebagai *Environmental Engineer* di AEGIS International, El Paso, Texas.

Ir. H. Arviyan Arifin - Direktur Director

Lahir di Padang tahun 1964, Insinyur Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung ini menjabat sebagai Direktur pada tahun 1999.

Perjalanan karir perbankannya dimulai di Bank Duta, mulai dari *Executive Trainee* 1989 hingga Corporate Banking Department Head Bank Duta cabang Surabaya pada tahun 1991. Selanjutnya tahun 1991 akhir beliau bergabung dengan Bank Muamalat sebagai *Department Head Commercial Banking, Assistant Vice President-Credit and Marketing* dan *Vice President - Marketing Group Head*. Tahun 1995, sebagai Kepala Divisi Bank Muamalat, beliau memperoleh penghargaan sebagai karyawan terbaik.

Born in 1958 in Tanjung Pinang, Riau, A. Riawan Amin obtained a BSc. degree in Architectural Technology from New York Institute of Technology, USA. He then obtained his Master's degree in Inter Disciplinary Study from the University of Texas through a scholarship. He became President Director of Bank Muamalat in 1999.

His career with Bank Muamalat began on Friday, November 10, 1993, as Divisional Head of Organization and Human Resources, then promoted to Vice President and Corporate Secretary in 1996, and Vice President for Individual Banking in 1998. Previously he served in Bank Duta (1989), and Bank Universal (1992). In 1987, he worked as an Environmental Engineer at AEGIS International in El Paso, Texas.

Born in 1964 in Padang, West Sumatera, Arviyan Arifin graduated as Industrial Engineer from the Bandung Institute of Technology (ITB). He became Director of Bank Muamalat in 1999.

His banking career begins at Bank Duta starting as an Executive Trainee in 1989 to Corporate Banking Department Head, Surabaya Business in 1991. He joined Bank Muamalat as Department Head of Commercial Banking, Assistant Vice President-Credit and Marketing and Vice President-Marketing Group Head. In 1995, as a divisional head, he received the Best Employee Award.

H. M. Hidayat S.E. Ak - Direktur Director

Lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1964. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Andalas, Padang. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2004.

Pernah bekerja di beberapa Kantor Akuntan Publik dan di Bank Duta (1989 - 1994). Bergabung dengan Bank Muamalat sejak 1994 dengan berbagai posisi yang pernah dijalani, antara lain: Kepala Departemen Review Pembiayaan Komersil (1995), Kepala Departemen Pengawasan Pembiayaan dan Treasury (1996), Kepala Urusan Pengawasan/ Kepala SKAI (1998), Pimpinan Cabang Cipulir (2001), Pimpinan Cabang Kalimalang (2002), serta General Manager Kantor Pusat Operasional (2003).

Ir. H. Andi Buchari, M.M. - Direktur Director

Lahir di Jakarta tahun 1966. Memperoleh gelar Insinyur dari IPB tahun 1988 dan Magister Management (Finance) Universitas Atmajaya Jakarta tahun 1996. Menjabat Direktur sejak tahun 2004.

Sebelum di Bank Muamalat pernah berkarir di Perusahaan PMA subsidiary dari United Catalysts Inc. USA (1989-1993) terakhir sebagai Deputy General Manager Sales & Logistic, sebagai Branch Manager Sekar Group (1989) dan Production Supervisor Mantrust Group (1988).

Masuk Bank Muamalat tahun 1993 melalui Muamalat Officer Development Program (MODP) dan kemudian menduduki berbagai posisi seperti Account Manager Corporate Banking, Kepala Group Marketing, Kepala Urusan Treasury & Investment Banking, Kepala Group Internal Audit/SKAI, Kepala Group Corporate Support, Corporate Secretary

Born in 1964 in Payakumbuh, West Sumatera. Obtained a degree in Economics and in Accountancy from Universitas Andalas, Padang. Appointed as Director of Bank Muamalat since 2004.

Previously worked with several public accountant firms and in Bank Duta (1989 - 1994). Joined Bank Muamalat in 1994 and rose through the ranks, amongst other as Head of Commercial Financing Review Department (1995), Head of Financing and Treasury Audit Department (1996), Head of Internal Audit (1998), Business Manager, Cipulir (2001), Business Manager, Kalimalang (2002), and General Manager, Operational, Head Office (2003).

Born in 1966 in Jakarta. Obtained a degree in Engineering from IPB in 1988 and a Magister Management (MM) degree in Finance from Universitas Atmajaya, Jakarta, in 1996. Appointed as Director of Bank Muamalat since April 2004.

Previously worked with a Foreign Investment Company as a subsidiary of United Catalysts Inc. USA (1989-1993) serving last as Deputy General Manager of Sales & Logistics, as Branch Manager of Sekar Group (1989) and Production Supervisor of Mantrust Group (1988).

Joins Bank Muamalat in 1993 through the Muamalat Officer Development Program (MODP), subsequently serving in various positions including Account Manager of Corporate Banking, Group Head of Marketing III, Head of Treasury & Investment Banking, Head of Internal Audit, Group Head of Corporate Support/Corporate Secretary, and

dan Regional Manager Sumut, Sumbar & NAD. Aktif mengikuti berbagai Workshop dan Training Perbankan & Keuangan Islam, baik di dalam maupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, India, Belanda dan Swiss. Memperoleh penghargaan sebagai Lulusan Terbaik/Cum Laude FPS Atmajaya, Lulusan Terbaik MODP dan Mahasiswa Teladan IPB.

Drs. U. Saefudin Noer, M.Si - Direktur Director
Lahir di Pandeglang, pada tahun 1965. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada tahun 1991 dan Magister Sains Manajemen Komunikasi pada tahun 2006 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. Menjabat sebagai Direktur sejak 2005.

Karir perbankan dimulai pada tahun 1996-1999, sebagai Asisten Presiden Direktur dan Sekretaris Perusahaan di Bank Duta. Tahun 1999 - 2000 sebagai Ketua Tim Komunikasi Merger 8 Bank ke dalam Bank Danamon. Kemudian pada tahun 2000 - 2002 beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan/ Kepala Divisi di Bank Syariah Mandiri. Bergabung dengan Bank Muamalat pada tahun 2003, sebagai Staf Khusus Presiden Direktur. Sebelumnya adalah Konsultan Manajemen Engineering and Project Director sebuah perusahaan berbasis di Punta Gorda, AS (1993 - 1996).

Telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan konferensi perbankan Islam internasional antara lain di Pakistan, Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), Kerajaan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Tajikistan dan Uzbekistan. Sebelumnya, antara tahun 1996-2000, juga aktif pada fora internasional, seperti ABAC (APEC Business Advisory Council) di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin, dan AEBF (Asia - Europe - Business Forum) di kawasan Asia dan Eropa.

Regional Manager for North Sumatera, West Sumatera and Nanggroe Aceh Darussalam. Attended various Banking/Islamic Finance workshops and trainings both local and international, in Kuala Lumpur, Singapore, Saudi Arabia, Bahrain, India, Belanda dan Switzerland . He was a Cum Laude graduate of FPS Atmajaya, Best Graduate of MODP and Best Student at IPB.

Born in 1965 in Pandeglang. Obtained a bachelor's degree in 1991 and a Master of Science degree in Communications Management in 2006 from the Faculty of Social and Political Sciences of the University of Indonesia, Jakarta. Appointed as Director of Bank Muamalat in 2005.

His career in banking started from 1996-1999 as Assistant to the President Director and Corporate Secretary of Bank Duta. Then from 1999-2000 as Head of the Communications Team of the Merger of Eight Banks to Bank Danamon. Thereafter between 2000 and 2002 he served as the Corporate Secretary/ Divisional Head at Bank Syariah Mandiri. He joined Bank Muamalat in 2003, as Special Staff to the President Director. Before that, he was an Engineering Management Consultant and the Project Director for the Company based at Punta Gorda, USA (1993 - 1996).

He has participated in various trainings, seminars and conferences on international Islamic banking, including in Pakistan, Malaysia, Singapura, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Tajikistan and Uzbekistan. Previously, between 1996-2000, was also active in several international fora, including ABAC (APEC Business Advisory Council) in the Asia Pacific region, and AEBF (Asia-Europe-Business Forum) in the Euro-Asia region.



Dimanapun Rekening Halalnya, Di Jaringan Shadr Setor Tunainya

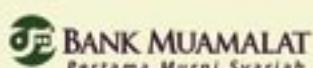
Kelompok Kerja



SHADR-iB

Sharia Deposit Arrangement (SHADR-iB) adalah layanan setoran tunai syariah secara *real time online* ke rekening-rekening di Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan jaringan bank umum lain yang terkoneksi dengan SHADR-iB melalui *counter Teller Bank/Non Bank* yang sudah bergabung dalam layanan ini.

Bank-bank peserta SHADR-iB tahapan awal saat ini adalah:



Kelebihan SHADR-iB

- *Real time online*
- Dapat dipergunakan siapa pun, baik pemilik rekening ataupun bukan pemilik rekening
- Murah
- Cepat dan efisien, karena langsung efektif di rekening tujuan saat itu juga
- Dana dapat disetorkan ke rekening di bank peserta interkoneksi SHADR-iB mana pun secara *real time online*
- Berlaku untuk seluruh nasabah bank peserta.

Cara Menggunakan Layanan SHADR-iB

1. Mengisi aplikasi transfer/formulir layanan SHADR-iB pada *counter* Bank peserta interkoneksi SHADR-iB
2. Menyerahkan aplikasi yang sudah diisi beserta jumlah uang tunai yang akan disetorkan ditambah biaya transaksi
3. Melakukan konfirmasi (bila perlu) kepada pemilik rekening tujuan bahwa dana sudah disetor.

Nikmati cara menyetorkan dana tunai antar rekening syariah pada seluruh bank peserta yang menjadi lebih mudah dan murah melalui SHADR-iB.

dan segera menyusul bank-bank lainnya.





Saatnya Menabung
Beli **shar**
Tambah Terus Saldonya



* Beberapa mungkin dalam proses

Dapat dibeli di semua Kantor Pos Online/ SOPP seluruh Indonesia yang bertanda

